

# MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL EKOLOGI BERBASIS KOMUNITAS

*(Cerita dari Kawasan Penyangga Suaka Margasatwa Nantu Boliyohuto)*

Franco Bravo Dengo, Zulkifli Mangkau



**Sanksi Pelanggaran Pasal 113  
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014  
Tentang Hak Cipta**

(1) Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).

(2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

(3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

(4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

# MEMBANGUN KETAHANAN SOSIAL EKOLOGI BERBASIS KOMUNITAS

*(Cerita dari Kawasan Penyangga Suaka Margasatwa  
Nantu-Boliyohuto)*

**JAPESDA GORONTALO**

**Penulis:**

Franco Bravo Dengo, Zulkifli Mangkau

**Penyunting:**

Christopel Paino, Nurain Lapolo

**Tim Pelaksana Program:**

Nurain Lapolo, Ahmad Bahsoan, Bambang Mamangkay, Ismail,  
Susanti S.Ponui

Didukung oleh:

**Global Environment Facility – Small Grants  
Programme  
(GEF - SGP)**

**Judul:**

**“Membangun Ketahanan Sosial Ekologi berbasis Komunitas”  
Cerita dari Kawasan Penyangga Suaka Margasatwa Nantu-  
Boliyohuto**

**Penulis:**

Franco Bravo Dengo, Zulkifli Mangkau

**Penyunting:**

Christopel Paino, Nurain Lapolo

**Tim Pelaksana Program:**

Nurain Lapolo, Ahmad Bahsoan, Bambang  
Mamangkay, Ismail, Susanti S. Ponui

**Desain sampul & tata letak:**

Moh. Noer Fadli Maliku

**Penerbit:**

Pertama kali diterbitkan pada September 2020

Oleh Ideas Publishing

Alamat: Jalan Ir. Joesoef Dalie No. 110

Kota Gorontalo

Surel: infoideaspublishing@gmail.com

Anggota IKAPI, No. 0001/ikapi/gtlo/II/14

**Cetakan I:**

SEPTEMBER 2020

xii + 71 hlm ; 14 x 21 cm

**ISBN 978-623-234-118-0**

## KATA PENGANTAR

Hutan Nantu pada mulanya diusulkan sebagai Suaka Margasatwa pada tahun 1999, melalui keputusan Menteri Kehutanan nomor 573/Kpts- II/1999 tanggal 27 Juli 1999 dengan luas saat itu adalah 31.215 hektar. Selanjutnya ditetapkan sebagai Kawasan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto berdasarkan Surat Keputusan Menhut Nomor 3029/Menhut-II/KUH/2014 tanggal 17 April 2014.

Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto adalah salah satu wilayah kawasan konservasi yang berada di provinsi Gorontalo. Kawasan Nantu-Boliyohuto ini berada di 3 (tiga) wilayah administrasi kabupaten yaitu kabupaten Gorontalo, kabupaten Boalemo dan kabupaten Gorontalo Utara. Kawasan ini merupakan tempat hidup dan berkembang biak berbagai jenis satwa liar dan endemik, seperti anoa, babi rusa, monyet Sulawesi, rangkong, tarsius dan spesies endemik lainnya ditopang oleh keberadaan hutan Nantu.

Hal penting lainnya di Kawasan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto adalah memiliki sungai Paguyaman. Sungai Paguyaman merupakan salah satu *landscape* dari Kawasan penyangga Nantu-Boliyohuto mewakili *landscape* sumberdaya alam yang membentang dari hulu di Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto sampai ke bagian hilir di wilayah laut Teluk Tomini, dengan panjang sungainya sekitar 136,25 Km. Sungai Paguyaman juga merupakan sumber mata air bersih dan sebagai sumber air bagi pertanian di Kabupaten Gorontalo dan Boalemo serta kebutuhan lainnya di masyarakat untuk kehidupan sehari-harinya.

Selain memiliki keanekaragaman hayati yang relatif masih baik, sungai ini juga memiliki potensi wisata alam yang penting untuk dikembangkan. Namun, masih terancam keberadaannya karena degradasi lingkungan di kawasan ini cukup besar. Sebelumnya di era tahun 1980-an, sebelum ditetapkannya Nantu-Boliyohuto sebagai Kawasan Suaka Margasatwa, kehadiran beberapa izin perusahaan HPH (Hak Pengelolaan Hutan) di kawasan ini turut memberikan andil terhadap ancaman kerusakan lingkungan. Demikian juga di era tahun 2010 hingga saat ini, kehadiran beberapa perusahaan sawit dan HTI (Hutan Tanaman Industri) menjadi salah satu ancaman terhadap keberadaan kawasan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto.

Kondisi ini diperparah dengan adanya aktifitas pertambangan baik yang legal maupun ilegal dan perkebunan dalam skala besar serta aktifitas pertanian masyarakat yang tidak ramah lingkungan, sehingga memberikan dampak yang cukup besar terhadap kerusakan ekosistem kawasan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto.

Melalui program *Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF-SGP)* fase-6 di Indonesia khususnya di kawasan *landscape* daerah penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto Provinsi Gorontalo dapat mengatasi masalah-masalah lingkungan dengan mengembangkan dan menerapkan strategi pengelolaan adaptif yang membangun ketahanan sosial dan ekologi berbasis komunitas.

Pengelolaan berbasis komunitas ini diharapkan agar komunitas dapat menjaga, dan mengkonservasi lingkungannya dengan memanfaatkannya secara baik.

Selain itu, keberlanjutan kegiatan sangat diharapkan bahkan setelah program ini memperoleh pendanaan dari GEF SGP.

Buku "**Membangun Ketahanan Sosial Ekologi berbasis Komunitas: Cerita dari Kawasan Penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto**" ini memberikan gambaran bagaimana usaha-usaha yang telah dilakukan masyarakat dalam upaya menjaga dan melestarikan kawasan penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto. Usaha yang dilakukan kelompok masyarakat bersama beberapa organisasi non pemerintah, universitas dan komunitas masyarakat ini berada di 3 (tiga) desa hulu dan hilir kawasan *landscape* daerah penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto, yaitu desa Tamaila Utara, desa Saritani dan desa Juriya.

Beberapa upaya yang dilakukan masyarakat antara lain praktek-praktek pengelolaan lahan pertanian berkelanjutan dengan pola pertanian sistem terasering, silvopastura, kebun percontohan, pupuk organik, kegiatan pengembangan usaha kelompok melalui diversifikasi olahan pangan lokal, kegiatan pemulihan ekosistem, kearifan lokal dalam pengelolaan keanekaragaman hayati dan pola pertanian di Gorontalo serta kegiatan pengembangan penggunaan teknologi energi baru terbarukan pada skala komunitas, melalui pemanfaatan aliran sungai untuk pembangkit listrik tenaga air dalam bentuk Picohydro.

Dalam implementasinya di lapangan, Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA) diberikan kepercayaan sebagai lembaga host di Gorontalo dengan dukungan pendanaan dari **Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF-SGP) Indonesia**,

melalui hubungan kerjasama kemitraan dengan beberapa organisasi non pemerintah, universitas dan komunitas masyarakat untuk mencapai tujuan program yakni "Peningkatan Ketahanan Sosial Budaya – Ekologis Masyarakat dalam Menghadapi Desakan Globalisasi di Gorontalo".

Pembuatan buku ini diprakarsai oleh Perkumpulan Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA) Gorontalo dan didukung sepenuhnya oleh *Global Environment Facility – Small Grants Programme* (GEF-SGP) Indonesia.

Kami menyadari pembuatan buku ini tidak akan terwujud tanpa adanya dukungan dari semua pihak-pihak terkait. Untuk itu ucapan terima kasih yang tak terhingga kami sampaikan kepada Catharina Dwihastarini, Meinar Sapto, dan Hery Budiarto serta seluruh tim sekretariat GEF-SGP Indonesia yang tidak bisa kami sebut satu per satu namanya.

Ucapan terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh mitra lembaga pelaksana program; Pusat Kajian Ekologi Pesisir berbasis Kearifan Lokal (PKEPKL) FMIPA Universitas Negeri Gorontalo (UNG), *Woman Institute for Research and Empowerment of Gorontalo* (Wire-G), Kelompok Marsudi Lestantun, BUMDes Mitra Usaha Tamaila Utara, Agraria Institute dan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Negeri Gorontalo (LPPM UNG) serta kepada seluruh tim *supporting system* program Perkumpulan JAPESDA Gorontalo, Rahman Dako selaku konsultan program yang sejak awal menyusun perencanaan kegiatan hingga adanya pembuatan buku ini.

Terima kasih juga kepada Ahmad Bahsoan selaku koordinator program, Sugeng Sutrisno selaku koordinator program sebelumnya dan kawan-kawan Dewan Pengawas Perkumpulan Japesda serta tim pelaksana kegiatan: Susanti S. Ponui, Ninang Odja, Ismail, Bambang Mamangkay, Arnold Ahmad dan seluruh tim JAPESDA yang tidak sempat disebut satu per satu dan sudah banyak memberikan kontribusi dan dukungan terhadap pelaksanaan program.

Ucapan serupa juga kami haturkan kepada Christopel Paino, Franco Dengo, dan Zulkifli Mangkau selaku tim penulis, sehingga buku ini bisa terbit dan menjadi bahan belajar bersama bagaimana menjaga, mengelola dan mempertahankan kearifan lokal masyarakat di kawasan penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto.

Kami menyadari jika pembuatan buku ini sungguh jauh dari kata sempurna. Sehingga kritik dan saran perbaikan akan sangat dihargai dan diharapkan. Semoga kehadiran buku ini bisa bermanfaat dan menjadi penyemangat bagi para pemerhati lingkungan dan pengambil kebijakan di Provinsi Gorontalo. Selamat membaca.

Gorontalo, Agustus 2020

**Nurain Lapolo**

Direktur JAPESDA

## KATA PENGANTAR

Membaca tulisan dalam buku "**Membangun Ketahanan Sosial Ekologi Berbasis Komunitas**" seperti melihat rangkaian gambar hidup kegiatan komunitas menjalani kehidupan keseharian dan juga saat mereka mengatasi ancaman lingkungan di wilayahnya. Gambar hidup yang terus bergerak tanpa mempertanyakan siapa yang hendak mendukung usaha mereka. Bagi komunitas, membangun ketahanan sosial ekologis itu wajib dilakukan dengan berkegiatan dengan keilmuan dan pengetahuan yang mereka pahami. Keberlanjutan diukur berdasarkan cara pandang mereka. Dan itulah letak keunikan dan kreatifnya.

Inisiatif unik dan kreatif yang dilaksanakan oleh masyarakat, komunitas, dan lembaga-lembaga pendampingnya itulah yang membuat GEF SGP Indonesia, sebuah program dana hibah kecil dengan pendanaan dari Global Environment Facility (GEF), tertarik dan mendukung pelaksanaannya. Bersama dengan Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (Japesda) Gorontalo, Woman Institute for Research and Empowerment of Gorontalo (Wire-G), Pusat Kajian Ekologi Pesisir berbasis Kearifan Lokal (PKEPKL), BUMDES Mitra Usaha, Marsudi Lestantun, Agraria Institute, dan LPPM Universitas Negeri Gorontalo, proses dukungan terhadap kegiatan dan pendampingan kepada komunitas pun dilakukan sejak tahun 2018.

Dapat dikatakan bahwa proses tersebut tidaklah mudah. Lokasi komunitas yang sangat sulit terjangkau, struktur sosial dalam wilayah dampingan yang berbeda satu dengan yang lain, dan jaringan telekomunikasi yang tidak lancar menjadi tantangan awal bagi lembaga-lembaga pendamping dalam melakukan proses pendampingan tersebut. Proses berkegiatan untuk mendukung inisiatif komunitas beberapa

kali perlu dilakukan penyesuaian. Belajar bersama dengan komunitas kemudian yang terjadi dalam pelaksanaannya. Jika dapat digambarkan proses tersebut, kita dapat melihat rangkaian-rangkaian gambar hidup yang penuh warna. Penuh kreatifitas. Unik karena kita akan melihat apa yang dikerjakan oleh komunitas di suatu wilayah tidak akan sama dengan wilayah lainnya.

Terimakasih kami sampaikan kepada teman-teman yang sudah menyusun buku ini: Franco Bravo Dengo, Zulkifli Mangkau, Christophe Paino, Bambang Mamangkay, Ismail, Susanti S. Ponui, Wawan Akuba, dan Fadly. Kepada Nurain Lapolo selalu Direktur Japesda, Ahmad Bahsoan dan Sugeng Sutrisno selaku koordinator program, serta seluruh team Japesda yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Kami juga mengucapkan terimakasih yang teramat sangat kepada Rahman Dako yang dari awal saat menyusun *Project Documentation* sudah terus mendampingi GEF SGP Indonesia di Gorontalo. Akhir kata kami sampaikan terimakasih kepada seluruh pendukung kerja GEF SGP Indonesia fase-6 di Gorontalo yaitu Woman Institute for Research and Empowerment of Gorontalo (Wire-G), Pusat Kajian Ekologi Pesisir berbasis Kearifan Lokal (PKEPKL), BUMDES Mitra Usaha, Marsudi Lestantun, Agraria Institute, LPPM Universitas Negeri Gorontalo, dan seluruh pihak yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu.

Selamat membaca buku ini. Mari kita belajar bersama dengan Komunitas dan ciptakan banyak cara yang unik dan kreatif untuk membangun negeri.

Salam

**Catharina Dwiastarini**

Koordinator Nasional GEF SGP Indonesia

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar	<i>halaman v</i>
Daftar Isi	<i>halaman xii</i>
<i>Bab 1</i>	<b>MENJAGA TUMBA MERAWAT MASA DEPAN</b> <i>halaman 01</i>
<i>Bab 2</i>	<b>TUMBA, SI BENTENG ALAM YANG KOKOH</b> <i>halaman 12</i>
<i>Bab 3</i>	<b>PEREMPUAN JURIYA BANGKIT UNTUK KEMANDIRIAN PANGAN</b> <i>halaman 22</i>
<i>Bab 4</i>	<b>KEMARAU MELANDA, BITULE JADI PENYANGGA</b> <i>halaman 31</i>
<i>Bab 5</i>	<b>BELAJAR DARI BENCANA</b> <i>halaman 39</i>
<i>Bab 6</i>	<b>KISAH BUNAERI</b> <i>halaman 46</i>
<i>Bab 7</i>	<b>KISAH TRANSMIGRAN MEMBANGUN KETAHANAN PANGAN</b> <i>halaman 57</i>
<i>Bab 8</i>	<b>MEMECAHKAN POLEMIC DI LAHAN TRANSMIGRASI</b> <i>Halaman 63</i>

# Bab 1

## Menjaga Tumba Merawat Masa Depan

*Tumba adalah sebuah dusun yang berhadapan dan berbatasan langsung dengan Suaka Margasatwa (SM) Nantu-Boliyohuto. Masyarakat yang tinggal di ketinggian sekitar 1000 Mdpl (Meter di atas permukaan laut) tersebut, menerapkan sistem agroforestri pada praktik pengolahan lahan perkebunan mereka. Selain itu, mereka juga menjadi benteng penjaga kawasan tersebut dari ancaman perusakan lingkungan.*

\*\*\*

Pukul 12.30 WITA. Matahari tepat berada di atas kepala Abdul Karim Mi'raj Bobihoe atau biasa disapa Risi (48). Ia berteduh pada sebuah pohon lamtoro di tengah lahan jagung miliknya. Sese kali, ia melepas topi yang dikenakannya, sembari menyeka keringat yang bercucuran di kepala.

Dengan saksama, ia memperhatikan jagung-jagung yang masih seukuran pinggang orang dewasa tersebut. Lahan Risi dipenuhi oleh beragam macam tanaman, baik itu tanaman tahunan dan tanaman musiman.

"Sederhananya, pohon untuk tempat berteduh. Juga untuk sumber pakan ternak," kata Risi. Pengolahan lahan seperti itu, dipelajarinya dari orang tuanya dulu.

"Di lahan pokoknya harus ada pohon, untuk jadi tempat berteduh buat saya."

Risi adalah satu dari sekian banyak warga yang bermukim di Dusun Tumba, Desa Tamaila utara, Kecamatan Tolangohula,

Kabupaten Gorontalo. Dari data pemerintah Desa setempat, Tumba dihuni oleh 250 orang atau sekitar 90 kepala keluarga. Sebagian besar penduduk di sini mempraktikkan agroforestri pada lahan-lahan perkebunan mereka.

Penerapan sistem kebun campur ini, pada dasarnya, sudah banyak dilakukan oleh sebagian besar petani di Gorontalo. Hanya saja, harga hasil panen tanaman-tanaman tahunan yang kadangkala tidak menentu, menjadi kendala bagi para petani.

Sistem agroforestri ini yang diperkuat komunitas Pusat Kajian Ekologi Pesisir berbasis Kearifan Lokal (PKEPKL) Universitas Negeri Gorontalo (UNG). Sebagai mitra Jaring Advokasi Pengelolaan Sumber Daya Alam (JAPESDA), melalui program Global Environment Facility (GEF) Small Grants Programme (SGP), mereka melakukan pendampingan kepada masyarakat Tumba.

Dalam khazanah bahasa Gorontalo Tumba artinya pohon sagu. Dulu, area tumba adalah kawasan hutan. Dasar inilah yang menjadi komitmen mereka untuk menjaga Tumba tetap asri, sebagaimana hutan.



Kawasan Hutan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maliku)

Tumba dijuluki "tempat pelarian" oleh warga setempat. Mereka yang gusar dengan kondisi sosial-ekonomi di kampung, memilih datang dan bercocok tanam di sini. Makanya, hampir keseluruhan warga Tumba bukan merupakan warga asli Desa Tamaila Utara. Desa Tamaila Utara adalah salah satu desa yang berada dalam wilayah administrasi Kecamatan Tolangohula. Tamaila utara sebelumnya merupakan bagian dari Desa Tamaila induk, yang kemudian memisahkan diri pada tahun 2010. Luas wilayah Desa ini 5.314.7 hektar atau 53.15 kilometer persegi.

Sedangkan fungsi kawasan di Desa Tamaila Utara meliputi: kawasan Hutan Primer, yang diperuntukkan sebagai Suaka Margasatwa (SM) Nantu- Boliyohuto, lewat SK.325/Menhut-II/2010 dengan luasan 1.817.5 hektar. Sementara kawasan Hutan sekunder yang diperuntukkan sebagai Hutan Produksi (HP) seluas 2.679.4 hektar.

Risi sebelumnya adalah warga Kecamatan Isimu, Kabupaten Gorontalo. Ia datang dan bermukim di Tumba tahun 2005 silam. Dengan dalih ingin mencari penghidupan baru serta berbekal teknik bertani seadanya, ia memulai kehidupannya di Tumba bersama sang istri, Ningsih (47).

Rumah Risi tepat berada di tengah pemukiman dan perkebunan warga. Rumah berbentuk panggung dan berbahan kayu tersebut bak istana yang dikelilingi pohon rindang. Beragam buah-buahan seperti kakao, nangka, jambu, jeruk dan lain sebagainya, berbaris rapi di semua penjuru area rumahnya. Seperti sebuah harmoni alam.



Ka Risi salah satu petani asal Tumba Desa Tamaila Utara yang mempraktekkan agroforestry/kebun campur di lahan kebunnya (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/Moh. Noer Fadli Maliku)

Aktivitas sehari-hari Risi lebih banyak dihabiskan di lahan. Bercengkrama dengan tanaman-tanaman kesayangannya. Bahkan, saking cintanya, ia menjuluki tanamannya "istri kedua". Kecintaannya terhadap tanaman, juga bisa dibilang sudah berada pada level tertinggi. Ia meyakini bahwa tumbuhan punya telinga.

"Mungkin orang akan menganggap ini gila. Pernah suatu hari rica saya lama sekali tidak berbuah. Saya stres, tak tau harus bagaimana. Lalu saya bisikkan ke rica saya: jika kalian tidak mau berbuah dan membantu saya, maka saya juga tidak akan merawat kalian lagi," cerita Risi.

Ia selalu terlihat gembira ketika membahas hubungan emosionalnya dengan tanaman.

"Eh, besoknya berbuah."

Tumba bertengger di Nantu-Boliyohuto, hutan yang kaya akan flora dan fauna endemik. Hutan hujan tropis ini merupakan kekayaan dunia yang sangat penting, karena nantu merupakan salah satu dari sedikit hutan di Sulawesi yang masih utuh.

Suaka Marga Satwa Nantu-Boliyohuto merupakan kawasan hutan yang menjadi kekayaan dunia. Di kawasan ini

merupakan bagian dari bio-geografi Wallacea yang kaya keanekaragaman hayatinya. Tidak jarang, warga mengaku sering menjumpai satwa-satwa langka.

“Yang paling banyak saya temui itu dihe (kera Sulawesi) dan burung rangkong. Macam-macam. Ada juga babi hutan. Banyak. Saya tidak tahu itu yang lain nama dan jenisnya apa.”

Hewan-hewan tersebut sering ditemui Risi saat ia berada di lahan perkebunan miliknya.

Nantu merupakan zona transisi dan campuran antara fauna Asia dan Australia. Di rimba ini hidup secara baik satwa yang tidak ada di bagian dunia lain seperti anoa (*Bubalus depressicornis*), babi rusa (*Babyroussa babyroussa*), monyet Sulawesi (*Macaca heckii*), tarsius (*Tarsius spectrum*), babi hutan (*Sus celebensis*).

\*\*\*

Pada periode tahun 1990-an, perambahan hutan sangat masif di hutan Nantu. Konon, setiap hari hewan langka seperti babi rusa, rusa dan anoa dijumpai mati akibat jerat yang dipasang pemburu. Melihat ancaman itu, pemerintahan daerah dan juga Lynn Clayton, seorang warga negara Inggris yang puluhan tahun melakukan penelitian di Nantu bersama dari beberapa universitas berinisiatif mengajukan daerah tersebut sebagai kawasan konservasi.

Kawasan ini diusulkan pertama kali sebagai Suaka Margasatwa sejak tahun 1999 melalui Surat Keputusan Menteri Kehutanan (SK Menhut) No. 573/Kpts- II/1999 tanggal 27 Juli 1999. Luasan pada saat itu masih sebesar 31.215 hektar.

Pada tanggal 17 April 2014, lahirlah SK Menhut No. 3029/Menhut-II/KUH/2014, yang mencantumkan luas Suaka Margasatwa Nantu-Bolihuto bertambah menjadi 51.639,17 hektar dengan menambahkan kawasan hutan lindung Gunung Bolihuto. Kawasan Suaka Margasatwa

Nantu-Boliyohuto adalah kawasan penyangga kehidupan masyarakat sekitarnya.

Kawasan Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto merupakan salah satu hutan yang masih terjaga di Pulau Sulawesi. Nantu-Boliyohuto adalah satu-satunya kawasan hutan tropis khas Sulawesi yang terbaik dan terluas di Provinsi Gorontalo, dan merupakan kawasan suaka alam yang memiliki ekosistem terlengkap di antara kawasan konservasi lainnya di bagian Utara Sulawesi.

Keberadaannya sangat penting bagi masyarakat sekitar hutan dan bagian hilir Sungai Paguyaman yang mencakup lebih dari 15.000 jiwa. Hutan Nantu yang merupakan ikon Gorontalo merupakan penyangga Daerah Aliran Sungai (DAS), yang mendukung ketersediaan air dan keseimbangan ekosistem. Sementara Tumba dan manusia-manusia di dalamnya adalah benteng terakhir Nantu.

### *Komitmen Bersama Menjaga Sungai*

Memasuki akhir tahun 2019 lalu, kemarau panjang melanda hampir seluruh wilayah Provinsi Gorontalo. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) mencatat, kala itu jumlah warga yang kesulitan mengakses air bersih akibat dampak kekeringan sebanyak 32.624 jiwa, yang tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Dan yang terparah adalah Kabupaten Gorontalo.

Tak hanya itu, selain krisis air bersih, masyarakat Gorontalo menghadapi ancaman gagal panen pertanian. Ditaksir ada 330 hektar sawah dan 1.850 hektar lahan jagung yang terdampak, sehingga pemerintah Provinsi Gorontalo menyatakan bahwa saat itu Gorontalo darurat kekeringan.

Kekeringan yang terjadi sebenarnya tidak lebih parah dari tahun 2015. Saat itu, fenomena El Nino yang lebih kuat menerjang Gorontalo. Tapi, yang paling memengaruhi dampak dari kekeringan kini adalah kondisi sungai di Gorontalo yang makin kritis.

Data dari Balai Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung (BPDAS-HL) Bone Bolango, dari 520 daerah aliran

sungai (DAS) yang ada di Provinsi Gorontalo, hanya 27 DAS yang masih masih dipertahankan (kondisi baik). Sementara, 493 atau 94 persen DAS lainnya sedang dipulihkan, dengan kata lain kondisinya kritis.

DAS Paguyaman adalah salah satu DAS terbesar yang masuk dalam kategori kritis. Sungai Paguyaman memiliki panjang sungai sekitar 136,25 Km. Mengalir dari barat ke timur, kemudian berbelok ke selatan. Sungai ini memiliki sekitar 146 anak sungai, yang membentang di dua Kabupaten: Boalemo dan Kabupaten Gorontalo.

Sungai Paguyaman yang berhulu di Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto melewati lanskap perkebunan-perkebunan sawit, perkebunan tebu untuk perusahaan gula, persawahan dan kebun-kebun masyarakat, pemukiman dan langsung ke laut.

Tumba, bisa dibilang, masuk dalam wilayah zona tengah sungai Paguyaman. Posisinya sangat krusial dalam menjaga sistem dalam siklus air. Risi dan warga Tumba lain sadar akan hal ini. Mereka mempertaruhkan segalanya untuk menjaga sungai. "Ada banyak kehidupan yang bergantung di sungai ini. Saya, kami, tentu akan menjaganya."

Tepat di bawah area sungai Tumba, telah dibangun infrastruktur berupa bendungan Tolangohula oleh Badan Wilayah Sungai (BWS) Sulawesi II. Bendungan ini yang dimanfaatkan sebagai sumber perairan petani di Kecamatan Tolangohula dan sekitarnya.

Selain itu, bendungan ini juga menyuplai air ke Instalasi Pengolahan Air (IPA) milik Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gorontalo. IPA yang mengalir ribuan rumah di Kecamatan Tolangohula dan sekitarnya adalah sumber air bersih bagi ribuan manusia.

Risi menceritakan, dulu mereka pernah kecolongan mendapati ikan-ikan mati di sungai. Penyebabnya diduga karena ada yang sengaja menabur racun (berupa pestisida) untuk menangkap ikan secara instan. Semua warga panik

karena air sungai ini juga menjadi sumber utama air minum. Mereka berkumpul melakukan musyawarah.

Sejak saat itu, mereka memberlakukan beberapa aturan, diantaranya akan lebih ketat jika ada orang "asing" (warga luar Tumba) yang datang ke sana. "Kalau ada orang pakai ransel, kami suruh buka, kami periksa, jangan sampai orang yang ingin meracuni sungai atau yang ingin menebang pohon di atas (kawasan hutan Nantu). Orang yang datang ke sini harus jelas maksud dan tujuannya."

Tak hanya melakukan filter kepada setiap pendatang, mereka juga merawat sungai dengan tidak mengonversi area bibir sungai menjadi lahan perkebunan. Tak ada yang membuka lahan dekat dengan sungai. Tak ada yang menebang pohon-pohon di bantaran sungai. Komitmen ini belakangan menjadi sumpah yang akan mendatangkan bencana ketika mereka melanggarnya.



Kondisi sungai di Dusun Tumba Desa Tamaila Utara yang hingga saat ini dijaga dan dimanfaatkan oleh masyarakat sekitar (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maliku)

Sungai sendiri sangat lekat dengan Budaya Gorontalo. Banyak tradisi dan budaya Gorontalo yang menempatkan sungai sebagai objek sakral, seperti pada tradisi **Motimualo**: ritual mandi bersama yang digelar saat ada anggota keluarga yang meninggal dunia. Konon, mandi bersama yang (harus) dilaksanakan di sungai ini mampu

melarung kesedihan usai ditinggal anggota keluarga yang meninggal dunia.

Ada juga upacara mandi safar. Mandi Safar merupakan ritual yang lazim dilakukan warga Gorontalo sejak puluhan tahun lalu. Tradisi ini biasanya dilakukan di setiap awal bulan Safar dalam penanggalan bulan Islam atau tahun Hijriyah. Ribuan warga akan berkumpul di sepanjang bantaran sungai yang diawali dengan doa syukur bersama, kemudian masyarakat akan mandi bersama dari air percikan sungai. Percikan sungai pada prosesi ini dipercaya dapat menolak bala dan mendatangkan rejeki bagi yang melakukannya. Ritual ini sudah turun-temurun dilaksanakan oleh masyarakat Gorontalo.

Meski sudah jarang ditemui, tradisi warisan leluhur seperti Motimualo dan mandi safar ini menjadi pengingat hubungan erat manusia dengan sungai dan alam. Meskipun kita tahu bersama pelarung duka dan penolak bala ini sedang dalam keadaan sekarat.

Ada banyak faktor yang menyebabkan kerusakan sungai, diantaranya perambahan hutan secara masif di bagian hulu yang merupakan daerah tangkapan air.

Menilik data dari BPDAS-HL Bone Bolango tahun 2017, sebanyak 312.092 hektar dari 1.203.350 hektar lahan di Gorontalo masuk kategori kritis. Lahan kritis tersebut berada di dalam dan luar kawasan hutan, padahal banyak program pemerintah Indonesia untuk melestarikan lingkungan, khususnya sungai.

Seperti akhir tahun 2019, ada Gerakan Nasional Pemulihan Daerah Aliran Sungai (GPNDAS), berupa penanaman pohon, kemah bakti dan pembagian bibit tanaman produktif dan kayu-kayuan.

Praktek-praktek yang sebenarnya sudah lama diinisiasi oleh warga Tumba, bahkan hingga saat ini. Sayangnya, komitmen warga Tumba dalam menjaga sungai sering diabaikan oleh warga lain. Bahkan, mereka sering dicemooh dan ditempli stigma berupa-rupa. Ada yang bilang "orang

gunung”, bukan karena mereka tinggal di area gunung, tapi karena mereka dianggap ketinggalan jaman dan udik. Bahkan ada juga yang memandang mereka hanya sekumpulan orang yang “putus sekolah”.

Hal-hal semacam itu seringkali hanya menjadi bahan lelucon bagi mereka. Setiap mendengar celoteh kosong tersebut, warga Tumba selalu punya jawaban yang menggelitik dan tajam. “Kalau kami biarkan sungai diracun, pasti mereka semua akan mati keracunan.”

### *Melestarikan Panggoba*

Di Tumba, dalam praktek bercocok tanam, warganya masih melestarikan salah satu kearifan lokal Gorontalo bernama Panggoba. Panggoba sendiri dalam bahasa Gorontalo adalah orang yang menguasai ilmu perbintangan dan mampu membaca tanda-tanda alam, sehingga Panggoba seperti telah menjadi kalender musim karena ia menentukan kapan harus menanam. Risi adalah salah seorang dari sedikit petani di Gorontalo yang masih memakai ilmu Panggoba. Menurutnya alam akan selalu memberikan pertanda: baik maupun buruk. Tugas manusia adalah membaca dan memahaminya. Setiap musim tanam tiba, Risi sering dipercaya warga Tumba sebagai pemberi fatwa.

“Saya mempelajarinya dari orang-orang tua dulu. Mungkin terlalu tinggi jika saya dikatakan Panggoba. Panggoba itu tataran ilmunya lebih tinggi,” kata Risi.

“Saya hanya bisa ilmu perbintangan, dan semua orang bisa belajar itu. Sedangkan Panggoba harusnya lebih dari itu.”

Dalam penelitian yang dilakukan Amirudin R. Dako dan Yowan Tamu berjudul “Rancang Bangun Prototipe Sistem Informasi Kalender Musim Berbasis Kearifan Lokal Masyarakat Gorontalo (2017)”, disebutkan bahwa dahulu kala di sepanjang jazirah Gorontalo ada orang yang diberi kepercayaan untuk bertugas mengurus bidang pertanian yang disebut Panggoba, karena orang tersebut menguasai ilmu perbintangan dan mampu membaca tanda-tanda alam.

Karena kelebihanannya, maka dia diberi kepercayaan untuk mengatur dan menjadi tempat bertanya perihal bercocok tanam, khususnya yang berkaitan dengan penentuan masa tanam, dan bagaimana menjaga tanaman agar terhindar dari hama dan penyakit.

Saat itu belum dikenal pestisida, insektisida dan sejenisnya. Berbekal pengetahuan lokal mengenai perbintangan (astronomi) maupun kemampuan supranatural yang dimiliki Panggoba, maka penentuan masa tanam yang tepat dapat dilakukan. Ketika masa pemeliharaan tanaman tiba, segala hama maupun penyakit yang melanda tanaman dapat dihentikan dengan keputihan asap kemenyan.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panggoba maupun masyarakat Gorontalo berpatokan pada empat bintang (sering disebut poliyama wopato) yang menjadi pedoman dalam memulai suatu pekerjaan bertani. Pedoman didasarkan pada pergerakan peredaran 4 buah bintang: Totokiya, Tadata, Otoluwa, Maluo.

Totokiya (Bintang Raja atau Altair), biasanya terlihat seperti tiga bintang yang paling berkilau. Kemudian, Tadata (tutupito) yakni Bintang Tujuh (Aldebaran), sekumpulan tujuh bintang yang berkumpul rapi. Otoluwa (bintang enam atau Twelingen), jumlahnya enam, dan Maluo (Bintang ayam atau Kref), jumlahnya juga 3 sama dengan Totokiya, hanya tata letaknya yang berbeda.

Warga di Tumba biasanya akan menggunakan ilmu perbintangan dari Panggoba ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, seperti terhindar dari hama atau gagal panen.

Bagi Risi, dengan mempraktekkan Panggoba, ia telah melestarikan warisan luhur nilai-nilai kearifan lokal Gorontalo, sekaligus menjaga Tumba sebagai benteng dalam menjaga ketahanan pangan lokal di Gorontalo, sebab dengan menjaga Tumba, ia sedang merawat masa depan lingkungannya demi generasi yang akan datang.\*\*\*

## Bab 2

### Tumba Si Benteng Alam yang Kokoh

Suatu ketika di tahun 2016, suara alat berat bergemuruh di perbatasan Dusun Tumba dan Dusun Bolongga. Jantung Abdul Thalib Male seketika berdegup kencang, begitu pula dengan puluhan warga Tumba lain yang berdiri di belakangnya. Mereka berbaris membentuk benteng kokoh hingga menutup hampir seluruh jalan setapak.

Alat berat yang dikelilingi beberapa aparat keamanan bersenjata lengkap mulai mendekat. Suasana sedikit mencekam, sementara itu warga Tumba sudah siap dengan senjata rahasia, bukan senjata api atau senjata tajam. Mereka bertahan dengan hasil bumi sendiri, baik pria maupun wanita memegang sebatang tebu.

Aparat keamanan kini berhadap-hadapan dengan warga. Dua orang pria berpakaian necis, ditemani aparat, mendekati Danggu Nani panggilan akrab Abdul Muthalib Male. Lelaki berusia 54 tahun itu berada di garda paling depan, terjadi negosiasi dan prosesnya berjalan cukup alot, hingga akhirnya aparat keamanan meminta warga Tumba menyingkir dan menyerah. Alih-alih mundur, puluhan warga justru merapatkan barisan, saling bergandengan tangan.

"Sampai titik darah penghabisan. Kami tidak akan pernah menyerahkan Tumba!"

Abdul Thalib berteriak di hadapan aparat dan warga yang datang menyaksikan, suaranya menggelegar, sontak membuat serdadu Tumba lainnya mengepalkan tangan ke langit. Tak nampak raut gentar pada rona wajah mereka. Melihat warga Tumba yang tak gentar, orang-orang

berpakaian necis yang rupanya adalah perwakilan perusahaan Hutan Tanaman Industri dari PT Gorontalo Citra Lestari (GCL), perlahan-lahan mundur. Mereka menyerah pergi meninggalkan warga Tumba.

“Tebu yang kami bawa saat itu sebenarnya untuk melepas dahaga, karena jarak dari Tumba ke bawah lumayan jauh. Tapi jika memang memungkinkan, bisa juga jadi senjata,” kata Danggu Nani menceritakan kembali perjuangan mereka mempertahankan tanah Tumba dari gempuran perusahaan.

Matanya selalu berkaca-kaca setiap kali mengenang kisah tersebut. Dia sadar, bukan hanya tanah yang mereka pertahankan, bahkan lebih dari itu, banyak kehidupan yang bergantung di Tumba.

Pada tahun 1998, Danggu Nani merupakan salah seorang dari belasan perintis yang pertama kali membuka lahan di Tumba. Saat itu dirinya masih remaja, dan bekerja sebagai seorang pekerja serabutan di kampung halamannya. Tak tentu arah hingga akhirnya “lari” dan menemukan Tumba sebagai tempat berlabuh terakhir. Berkat keberanian dan kegigihannya menjaga Tumba, warga menjuluki Danggu Nani sebagai Kepala Suku.

“Saat pecah ketegangan dengan perusahaan itu, saya sudah tidak peduli lagi dengan nyawa saya.”

Korporasi seperti HTI memang sering menjadi sorotan. Dari data yang dimiliki Forest Watch Indonesia (FWI), sampai tahun 2013, sekitar 10 juta hektar kawasan hutan di Indonesia telah dimanfaatkan untuk industri Hutan Tanaman Industri atau izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu pada hutan tanaman. Jumlah tersebut meningkat tajam

dibandingkan tahun 1995 yang hanya seluas 1,13 juta hektar.

Pembangunan HTI menghadirkan cerita konflik sosial di berbagai daerah di Indonesia. Khusus di Gorontalo, warga Tumba sebenarnya bukan satu-satunya kelompok yang bermasalah dengan HTI. Pada periode dan perusahaan yang sama, banyak lahan milik warga Desa Tudi, Kecamatan Monano, Kabupaten Gorontalo Utara yang bersengketa dengan PT Gorontalo Citra Lestari. Rendahnya keterlibatan masyarakat dalam perencanaan pembangunan HTI di wilayah mereka menjadi pemantik persoalan.

Mulanya ketegangan di Tumba sudah ada sejak tahun 2011, saat perusahaan HTI mulai melakukan sosialisasi di tingkat desa. Menurut Danggu Nani, warga Tumba sama sekali tidak dilibatkan. Padahal, objek konsesi lahan HTI adalah Tumba dan sekitarnya. Dari sinilah perlawanan dimulai, meskipun sedari awal ia menyadari yang dihadapi adalah modal besar.

\*\*\*

Sejak adanya surat izin pengelolaan kepada perusahaan, warga sebenarnya sudah menyerah. Mereka merasa sudah tidak bisa lagi berbuat apa-apa. Karena pihak perusahaan secara administrasi sudah mengantongi konsesi lahan mereka, lewat Surat Keputusan Menteri Kehutanan No. 261/Menhut- II/2011. Meski begitu, Danggu Nani tetap bersikukuh menjaga bara api tetap menyala.

"Baru pembukaan akses jalan saja, sudah banyak dampak yang terjadi. Longsor secara terus-menerus. Padahal sebelumnya tidak pernah dan yang paling terdampak adalah warga yang berada di bawah (pusat Desa). Ini yang membuat saya tetap melanjutkan perjuangan."

Puncaknya, pada awal tahun 2018, dampak itu menjadi nyata. Banjir melanda hampir sebagian wilayah Kabupaten

Gorontalo, dan Tamaila Utara adalah desa yang diterjang banjir bandang kala itu.

Banyak rumah warga yang rusak parah. Tak terkecuali fasilitas-fasilitas umum seperti masjid dan sekolah. Dari sejarah desa tersebut berdiri, baru kali itu banjir ekstrim melanda dengan volume air yang besar.

Banyak kemudian yang menghubungkan penyebab banjir yang disertai longsor ini akibat aktivitas HTI di kawasan hulu. Danggu Nani akhirnya mulai mendapat dukungan warga yang merasakan sendiri dampak dari aktivitas pembabatan di kawasan penyangga Suaka Margasatwa Nantu-Boliyohuto.

Jika warga Tumba menyebutnya kepala suku, maka sebaliknya, pihak perusahaan menganggap dia sebagai provokator. Sebagai tokoh yang dianggap paling berpengaruh, dirinya acap kali menjadi target yang harus "dilumpuhkan". Mulai dari ditawari uang berlimpah, jabatan, bahkan sering diancam dengan kekerasan: hal yang sama sekali tak membuatnya bergeming.

Pernah suatu waktu, beberapa orang berperawakan preman mendatangi kediaman Danggu Nani dengan membawa parang, mereka meminta Danggu Nani segera angkat kaki dari Tumba. "Saya hanya bilang kepada mereka, lebih baik saya mati dan dikubur di sini, daripada harus menyerahkan tanah Tumba."

Tak berani, para preman tadi mundur. Ciut. Lalu Pulang.

Tekanan-tekanan yang dilakukan perusahaan membuat hidup Danggu Nani dipenuhi kecemasan. Cemas dengan keluarganya, terlebih lagi cemas dengan warga yang menggantungkan penghidupan mereka di Tumba.

Ia pernah mengadu dan mempertanyakan nasib mereka kepada pemerintah, melalui Bupati maupun Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Mediasi-mediasi pun banyak dilakukan, namun tak mendapatkan titik terang. Tumba masih tergadai.

Dari tahun ke tahun, perang dingin berlangsung antara warga Tumba dan HTI. Berbagai macam delegasi dikirim ke Tumba untuk meluluhkan warga, dan tetap saja akan pulang dengan hasil nihil. Setiap kali alat berat memasuki perbatasan, setiap kali itu juga warga Tumba akan membentuk benteng penghadang. Solidaritas mereka selalu bisa "memukul mundur" pihak perusahaan.

Akibat konflik yang berkepanjangan itu, Danggu Nani beberapa kali dilaporkan dan harus berhadapan dengan pihak kepolisian. Hal itu diduga dilakukan untuk menimbulkan shock therapy kepada warga Tumba.

"Kedua kaki kami ini sudah kami tanam di Tumba. Kami tidak akan kemana-mana," ungkapan itu kerap kali ditegaskan Danggu Nani kepada siapa saja yang ingin mengukur kegigihan mereka.

Pada tahun 2019, melalui Peraturan Presiden Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan (PPTKH), pemerintah akan segera menyelesaikan dan memberikan perlindungan hukum atas hak-hak masyarakat yang menguasai atau memanfaatkan bidang tanah dalam kawasan hutan. Masyarakat yang menguasai tanah di kawasan hutan akan diberikan hak milik apabila memenuhi kriteria tertentu.

Melalui program reforma agraria berbasis Tanah Objek Reforma Agraria (TORA), pemerintah mengalokasikan

seluas 9 juta hektar lahan untuk dibagikan kepada petani. Program ini merupakan salah satu mandat Nawa Cita yang terkandung dalam rancangan pembangunan tahun 2015-2019. Pemerintah akhirnya telah menyetujui Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam Kawasan Hutan di 130 kabupaten dan kota di seluruh Indonesia.

Dusun Tumba masuk dalam kriteria TORA. Akhir tahun 2019, pihak kementerian sudah melakukan pengukuran lahan-lahan di Dusun Tumba, sebagai prosedur awal administrasi pembuatan sertifikat tanah. Artinya, warga Tumba akan memiliki sertifikat dan hak kepemilikan penuh atas tanah mereka. Perjuangan mereka selama bertahun-tahun mempertahankan Tumba tidak sia-sia.

### *Merawat Semangat Huyula*

Tumba dalam bahasa Gorontalo berarti pohon sagu, pohon yang dikenal kokoh yang memiliki batang tegak, kuat dan bisa hidup lama, serta menjadi panganan lokal. Di Tumba, tidak hanya menjadi tempat milik warga suku Gorontalo, banyak warga transmigran dari Pulau Jawa yang juga memiliki lahan dan bermukim di sana.

Selain itu, Tumba juga menjadi saksi proses pembauran Polahi (komunitas Gorontalo yang mengasingkan diri di hutan selama bertahun-tahun) dengan masyarakat. Mereka melebur dengan semangat huyula.

Tinggal bersama di area "terisolir", jauh dari perkotaan dan keramaian, dengan sendirinya membentuk solidaritas sosial warga Tumba. Mereka yang datang dari berbagai latar belakang, dipersatukan oleh semangat huyula.

Dalam bahasa Gorontalo, "huyula" merupakan pranata sosial berupa gotong royong atau tolong menolong antara anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dan kepentingan bersama.

Dalam perkembangannya, sistem huyula telah mengakar sebagai jati diri masyarakat Gorontalo, bukan saja pada

kegiatan memenuhi kebutuhan hidup, akan tetapi sudah lebih luas lagi, antara lain dalam membangun rumah, sarana ibadah, membangun jalan, membuat fasilitas umum, kegiatan upacara, dan lain-lain.

“Dulu akses sangat susah, perlu waktu beberapa jam untuk bisa sampai ke sini, karena dulu kita juga masih sering jalan kaki. Motor belum bisa tembus,” kata Risi Bobihoe, tokoh masyarakat di Tumba, mengingat kesulitan mereka dulu.

“Kami mengumpulkan uang untuk membuat akses jalan seadanya, semua ikut ambil bagian.”

Dalam bukunya yang berjudul “Nilai-Nilai Kearifan Lokal (Local Genius) Studi Empiris tentang Huyula” (2014), Rasid Yunus mengemukakan huyula sudah dikenal sejak dahulu. Pada saat itu daratan Gorontalo masih tergenang air, terutama air laut dan penduduknya masih mengembara di pegunungan Tilongkabila Bone Bolango (salah satu Kabupaten di Provinsi Gorontalo).

Setelah daratan Gorontalo terwujud pada abad ke-10, maka sistem huyula ini berkembang menjadi tradisi masyarakat terutama dalam bidang pertanian dan pembangunan.

Pada saat Gorontalo memasuki masa-masa kerajaan, yakni sekitar abad ke-12 Raja memanfaatkan huyula ini untuk mengolah tanah pertaniannya. Rakyat pun secara spontan dan suka rela bekerja mengolah lahan pertanian milik raja dan para bangsawan. Demikian pula setelah masuknya Islam di Gorontalo pada abad ke-14, huyula tetap terus dipertahankan oleh rakyat Gorontalo.

Kebersamaan warga Tumba akan sangat nampak bila musim tanam-panen tiba. Masyarakat Gorontalo menyebutnya motiayo, tradisi yang masih terpelihara dan menjadi kebiasaan yang menyatukan petani dalam kegiatan dan aktivitas pertanian. Sejak dari proses membersihkan lahan, membajak lahan, merawat tanaman sampai dengan memanen secara gotong royong.

Para pria bekerja di lahan, dan wanita ramai-ramai membawa makanan, sementara anak-anak bermain riang. Potret kebersamaan yang kian langka dijumpai di era modernisasi ini.

“Bisa sampai puluhan orang. Semua datang bekerja (gotong-royong), seperti pesta,” ujar Risi.

Di Dusun Tumba, perempuan dan laki-laki mempunyai porsi yang sama, baik dalam menggarap lahan maupun dalam finansial rumah tangga. Khusus dalam pemenuhan ekonomi keluarga, perempuan Tumba mengambil peranan yang sangat penting, khususnya saat produktifitas perkebunan atau harga hasil kebun mereka anjlok.

Tahun 2018-2019, mungkin menjadi tahun yang buruk bagi petani kelapa di seluruh di Indonesia. Pasalnya, saat itu harga kopra turun drastis, dari yang sebelumnya 8.000 rupiah perkilogram, menjadi 2.000 rupiah bahkan mencapai 1.000 rupiah perkilogram. Gelombang protes pun mengemuka di berbagai daerah.

Sementara itu, kelapa merupakan salah satu komoditas utama di Tumba. Alih-alih melakukan protes, kaum perempuan, khususnya ibu-ibu di Tumba hadir sebagai lentera di kala suami mereka kecewa besar dengan anjloknya harga kelapa.

Diinisiasi oleh Pusat Kajian Ekologi Pesisir berbasis Kearifan Lokal (PKEPKL) Universitas Negeri Gorontalo (UNG), yang bermitra dengan Jaringan Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (JAPESDA), melalui program Global Environment Facility – Small Grants Programme (GEF-SGP), mereka membuat kelompok untuk pembuatan VCO (Virgin Coconut Oil).

VCO adalah minyak multi fungsi, selain berkhasiat untuk kesehatan, minyak ini bisa juga dipakai untuk minyak urut, handbody, bahkan sangat baik digunakan untuk perawatan wajah. Kandungan asam laurat, memiliki fungsi melembutkan dan melembabkan kulit. Sebagian besar

perempuan di Tumba menggunakan minyak tersebut sebagai polesan wajah.



Hasil olahan produk kelapa menjadi VCO (Virgin Coconut Oil) yang diproduksi oleh kelompok perempuan di Dusun Tumba Desa Tamaila Utara (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maluku)

“Kelapa di sini melimpah, bahkan sering rugi membusuk, makanya kita sangat antusias dengan pembuatan VCO untuk membantu suami,” kata Iyam Bobihoe (40).

Iyam adalah ketua kelompok industri pembuatan VCO. Kelompok yang beranggotakan puluhan perempuan ini mulai memulai produksi VCO akhir tahun 2019. Minyak kelapa murni atau lebih dikenal dengan VCO merupakan modifikasi proses pembuatan minyak kelapa.

Berbeda dengan pembuatan minyak kelapa kampung, produk ini memiliki kadar air dan kadar asam lemak bebas yang rendah, berwarna bening, berbau harum, serta mempunyai daya simpan yang cukup lama yaitu lebih dari 12 bulan.

Perbedaan utama biasanya terdapat pada proses pengolahannya atau proses pengekstraksiannya. Untuk menghasilkan VCO melalui beberapa tahapan, kelompok perempuan Tumba menggunakan teknik fermentasi. Proses pembuatannya yang sederhana, dikatakan Iyam tidak banyak menyita waktu mereka untuk mengurus urusan rumah tangga.

"Biasanya kita kan membuatnya sore, sehabis pulang dari lahan, kita sudah berbagi tugas, ada yang mencukur dan lain-lain. Setelah semuanya selesai, tinggal didiamkan (untuk memisahkan santan dan minyak murni). Setelah itu semua kembali ke rumah masing-masing dan besoknya kita ambil hasilnya," kata Iyam.

Kandungan VCO didominasi oleh lemak jenuh yang berupa MCT (Medium Chain Triglyceride) dan asam laurat. Salah satu khasiat VCO bagi kesehatan yakni mampu melancarkan metabolisme tubuh. Karena khasiatnya tersebut, di awal produksi kelompok perempuan Tumba, dibanjiri permintaan dan pesanan.

Semua hasil penjualan VCO akan dibagikan kepada para anggota secara merata. Karena baru awal merintis, Iyam mengaku masih banyak yang harus dikembangkan. Mereka juga sudah mengajukan produk VCO ini untuk standarisasi Balai Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).\*\*\*

## **Bab 3**

# **Perempuan Desa Juriya Bangkit untuk Kemandirian Pangan**

Langit di Juriya sore itu mulai gelap. Matahari yang awalnya memancarkan sinarnya pelan-pelan hilang di peraduan. Lampu penerang jalan mulai menyala, seperti parade baris-berbaris, diikuti rumah-rumah warga lainnya. Tak lama berselang satu persatu perempuan Desa Juriya anggota dari kelompok "Cinta Kasih" mulai berdatangan.

Mereka menepati janji berkumpul di rumah produksi yang berbentuk panggung itu untuk membahas pembuatan stik jagung Opa Lo Tilo yang hampir setahun digeluti. Satu persatu anggota kelompok "Cinta Kasih" ini menaiki tangga dan mulai memadati ruangan pertemuan yang tidak begitu luas dan mulai merencanakan pembuatan stik jagung pada rumah anggota berikutnya.

Saat ini anggota kelompok "Cinta Kasih" berjumlah sepuluh orang, terdiri dari perempuan remaja hingga ibu rumah tangga. Umur mereka berkisar mulai dari 19 tahun hingga 46 tahun. Ayah atau suami mereka adalah petani jagung di Desa Juriya. Ketua kelompoknya bernama Riana H. Itti.

"Kenapa nama kelompoknya dinamakan "Cinta Kasih"? Karena itu bermakna cinta yang selalu dihaturkan kepada sang pencipta dan kasih yang selalu dipegang erat-erat oleh manusia," kata Riana.

Sejak dibentuk pada awal Januari tahun 2019, kelompok "Cinta Kasih" sudah melakukan produksi stik jagung Opa Lo Tilo yang ke sepuluh kalinya. Hasil produksi dijual ke pasaran serta untuk memenuhi pemesanan atau langganan dengan latar belakang yang beragam, mulai dari pegawai kantor, hingga orang-orang yang terlibat dalam kegiatan non-

pemerintahan. Pemesannya pun ada yang datang dari Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya.

"Beberapa waktu lalu kami buat sekitar 45 bungkus untuk dikirim ke Jakarta, Yogyakarta, dan Surabaya. Mereka suka dengan stik jagung Opa Lo Tilo ini," ujar Riana.

Hanya saja menurutnya, banyak persoalan dan kendala yang saat ini mereka rasakan. Dari keterbatasan alat penggilingan manual yang harus menggunakan tenaga ekstra, hingga label perijinan kesehatan dari dinas terkait yang belum ada. Akibatnya produksi olahan jagung itu tak bisa dipasarkan secara luas.

Kendala lainnya yang dirasakan baik oleh kelompok perempuan dan petani adalah musim kemarau panjang. Kekeringan yang melanda Desa Juriya tidak hanya berdampak pada hasil panen, namun juga pada bahan dasar pembuatan stik jagung tersebut. Sebagai contoh pada tahun 2019 kemarin, sebagian besar lahan perkebunan gagal panen.

Di sisi lain, desa Juriya sendiri mendapatkan predikat desa inovasi dari pemerintah tingkat kabupaten Gorontalo. Predikat itu diberikan karena keberhasilan warga desa memanfaatkan komoditas menjadi olahan makanan pangan lokal seperti stik jagung ini.

Sayangnya, meski telah mendapat predikat desa inovasi, pemerintah desa sebelumnya belum memberikan apresiasi kerja-kerja kelompok perempuan "Cinta kasih".

Padahal kerja mereka dalam menjaga ketahanan pangan lokal sangat berperan penting bagi warga desa Juriya, serta keberadaan kelompok ini bisa jadi kunci utama untuk menjaga pangan lokal di desa Juriya melalui pengolahan stik jagung Opa Lo Tilo tersebut.

"Kami berharap ke pemerintah desa yang sekarang bisa dapat membantu dan melirik kerja-kerja kelompok ini," kata Riana berharap. Keberadaan kelompok perempuan "Cinta Kasih" seiring dengan kehadiran Wire-G (Women Institute Research Empowerment of Gorontalo), sebuah lembaga non

pemerintah yang memberikan perhatian pada isu perempuan dan kesetaraan gender di desa Juriya. Wire-G yang mendapatkan dukungan dari GEF-SGP (Global Environment Facility – Small Grants Programme) ikut membantu melakukan gerakan peningkatan ekonomi masyarakat khususnya pada perempuan desa di Juriya.

Inisiatif membentuk kelompok ini terbangun atas kesadaran perempuan desa yang melihat hasil jagung suami mereka banyak tak dimanfaatkan dan hanya berakhir di tangan tengkulak dengan harga serta hasil penjualan tak memuaskan. Distribusi yang sangat panjang menyebabkan hasil panen jagung di desa Juriya tak menunjukkan peningkatan yang maksimal setiap tahunnya.

Sementara petani di desa ini banyak yang memanfaatkan lahan-lahan miring untuk ditanami jagung, bahkan tak sedikit para petani harus bertaruh nyawa dengan kemiringan lahan yang mereka olah. Tujuannya hanya satu, mendapatkan hasil panen yang melimpah tanpa memikirkan keberlanjutan lahan pertanian mereka ke depan.

“Masalah soal distribusi yang panjang, dan hanya menguntungkan tengkulak saja mulai dipahami oleh ibu-ibu rumah tangga di desa Juriya.”

Di saat bersamaan, kesadaran ibu-ibu rumah tangga dalam memahami betapa pentingnya mendukung ekonomi keluarga mulai digalakkan. Kini, saat panen tiba, petani sebisa mungkin menyisakan jagung hasil panen agar disetor kepada kelompok dan dikerjakan secara bersama-sama untuk dibuatkan stik jagung.

Pekerjaannya pun dilakukan di masing-masing rumah anggota kelompok secara bergiliran. Jadi, akan diundi rumah siapa berikutnya yang akan jadi tempat produksi dan pembuatan stik jagung berikutnya.



Hasil olahan produk jagung lokal menjadi stik jagung yang diproduksi oleh kelompok perempuan di Desa Juriya (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maliku)

Untuk harga mereka menjualnya dengan harga beragam. Di pasar lokal, biasanya dijual dengan harga Rp 15.000, sedangkan di pasar luar daerah, mereka menjual seharga Rp 25.000. Sayangnya, ketiadaan label kesehatan sebagai salah satu syaratnya kadang menjadi kendala untuk dijual dalam jumlah banyak di luar daerah.

"Sebenarnya pengurusannya sedang dalam proses yang dibantu oleh Wire-G. Semoga saja dalam waktu dekat sudah ada," ujar Riana.

### *Asal Mula Nama Tilo*

Minggu di pertengahan Januari 2019 itu, kepulan asap membumbung di dapur Neli Moito. Hari itu adalah jadwal memasak stik jagung di rumahnya. Perempuan paruh baya itu mulai mengecilkan api yang bersumber dari kayu dan membakar tungku. Di atasnya panci berisi rebusan jagung dicampur tilo yang dimasak selama dua jam mulai didinginkan.

Dari proses pembuatan stik inilah nama jagung Opa Lo Tilo diambil, di mana jagung yang sudah berumur tua dan keras, akan dimasak bersamaan dengan kapur putih atau sebutan lokalnya tilo.

Tilo sendiri dibuat oleh warga Juriya dari kerang atau kijing yang hidup di air tawar atau sungai. Kijing tersebut dibakar

menggunakan bambu untuk dihilangkan bagian hitam dalam setiap kulitnya, lalu ditumbuk halus dan selanjutnya disaring untuk mendapatkan hasil akhirnya yang halus. Hasil akhir yang halus itu disebut tilo dan dipakai sebagai bahan pelunak jagung yang sudah tua yang nantinya akan jadi bahan utama dalam pembuatan stik.

Tidak lama kemudian Neli mulai mengangkat jagung yang sudah ditiriskan sebelumnya. Proses penggilingan pertama pun dimulai. Setelah itu masuk pada proses penggilingan kedua yang dicampurkan rempah-rempah seperti daun seledri dan bawang putih, setelah itu digiling kembali, dan proses ketiga pencampuran jagung dengan tepung agar berbentuk adonan berupa garam, gula, telur, mentega, dan selanjutnya digiling kembali. Biasanya pada proses ketiga inilah banyak anggota yang mengeluh kelelahan karena saat penggilingannya membutuhkan tenaga yang serba ekstra.

"Semua pekerjaan memang dilakukan oleh perempuan di sini, tapi kadang juga ada laki-laki yang datang membantu. Mereka membantu bagian menggiling saja, karena itu pasti memakan tenaga yang sangat banyak, jadi kami turut mengikutkan mereka," ujar Neli.

Selain Neli, beberapa anggota kelompok juga tampak bergumul mengerjakan tugas masing-masing di dapur yang hanya berukuran 3x5 meter itu. Ada yang sedang meniriskan jagung, memisahkan jagung yang sudah masak dengan tilo, setelah itu dicuci bersih dengan air. Yang lainnya sibuk mengupas bawang putih, menyiapkan alat penggilingan, dan memotong halus daun seledri.

Sebagian besar perempuan anggota kelompok "Cinta Kasih" tidak hanya memasak atau membuat stik jagung. Mereka juga ikut berpartisipasi dalam proses menanam, perawatan, hingga panen. Untuk alasan itulah mereka menjadi tahu, bahkan resah ketika harga jagung yang tak kunjung stabil. Maka, agar jagungnya bisa bernilai ekonomis, hasil kebun suami mereka dijadikan sebagai stik yang diberi nama Opa Lo Tilo.

Uniknya lagi, pembuatan stik jagung ini tidak menggunakan jagung hibrida bantuan dari pemerintah atau yang diperjual belikan di pasaran. Tapi mereka menggunakan jagung lokal atau dalam bahasa Gorontalo disebut Binthe Kiki sebagai bahan dasarnya. Jagung lokalnya tak diperjual belikan, mereka bisa mendapatkan begitu saja asal ada keinginan untuk menanam dan mau mengonsumsi kembali jagung tersebut.

Jagung lokal sendiri mulai tak diminati bahkan mulai hilang dan digantikan oleh jagung hibrida. Padahal dulunya warga di desa Juriya mengonsumsi dan memelihara jagung lokal sebagai pangan lokal di desa tersebut. Namun seiring berjalannya waktu, jagung lokal tersebut bangkit kembali.

### *Binthe Kiki si Jagung Lokal*

Jika menyebut binthe kiki atau jagung lokal di Desa Juriya, maka warga akan mengidentikkannya dengan Lince Mosi. Perempuan berusia 46 tahun yang populer dengan sapaan Ma Tou ini adalah sosok yang paling dikenal karena kedermawanannya dalam hal mengedukasi masyarakat mengenai binthe kiki.

Kegigihan Ma Tou dalam menanam jagung lokal menjadi perhatian warga desa, dan beberapa diantaranya mulai ikut menanam juga. Ma Tou memberikan kepada siapa saja yang mau menanam. Dia tak mau jagung lokal tersebut diperjual belikan.

Sebagai keluarga petani, tentu saja Ma Tou sudah terbiasa menjalankan keseharian menanam jagung-jagung lokal miliknya, yang ia tanam dan rawat di kebun miliknya sendiri. Ia memilih jagung lokal untuk pertaniannya dibandingkan jagung hibrida, karena jagung lokal sangat sehat untuk dikonsumsi dan sangat cepat proses untuk memanennya. Tak perlu menunggu sampai 5-6 bulan, hanya memerlukan waktu tiga bulan saja, jagung lokal bisa dipanen.

Hal yang menarik perhatian dari Ma Tou sendiri adalah sikap kedermawanannya. Ia membagikan jagung lokal kepada masyarakat dengan tujuan menjaga kemandirian pangan

lokal yang ada di desa Juriya. Ketika sedang panen jagung lokal, ia tak menjualnya, melainkan diberikan kepada warga setempat yang mau mengonsumsinya.

Namun pemberian itu harus dengan syarat yaitu barang siapa yang mau mengonsumsi jagung lokal, ia harus memberikan sekian persegi lahan garapannya untuk ditanami lagi jagung lokal tersebut.

“Dulu saat orang-orang tua kami masih hidup di sini, mereka mengonsumsi jagung lokal ini. Tapi saat ini sudah tidak ada lagi yang mau menanamnya, dan saya mau melanjutkan kebiasaan orang dulu,” kata Ma Tou.

Bagi Ma Tou, jagung lokal sudah dianggap sebagai anak sendiri. Ia jaga dengan sepenuh hati, dirawat dengan kasih sayang, agar kelak ia tak akan hilang lagi dan digantikan dengan jenis jagung baru seperti hibrida tersebut.

Dengan adanya kelompok “Cinta Kasih”, yang saat ini mulai menggunakan jagung lokal sebagai bahan dasar utama mereka dalam membuat stik jagung Opa lo Tilo, setidaknya sedikit membantu kampanye mencintai pangan lokal yang telah lama dipraktikkan oleh Ma Tou.

Kolaborasi antara Ma Tou dan kelompok stik jagung ini juga bagian dari kampanye menjaga stabilitas pangan, serta memanfaatkan hasil panen dari komoditas yang terbuang dengan sia-sia karena masalah distribusi yang terlalu Panjang.

### *Minyak Kelapa Kampung Nenek Biah*

Selain Ma Tou, di Desa Juriya dikenal seorang perempuan pembuat minyak kelapa kampung yang khas. Namanya Rabiah Adenga atau biasa dipanggil Nenek Biah. Nenek Biah dikenal tak mau memakai minyak kelapa yang pada umumnya diperjualbelikan di warung-warung kecil. Alasannya sederhana, menggunakan hasil olahan sendiri dan mempertahankan pengelolaan hasil pangan di Desa Juriya secara mandiri.

Dalam pembuatan minyak kelapa kampung, Nenek Biah sebisa mungkin mengumpulkan enam buah kelapa yang ia dapatkan secara gratis dari lahannya sendiri. Enam buah kelapa itu bisa menghasilkan satu botol minyak kelapa kampung dengan citarasa khas, dan mampu bertahan selama dua atau tiga bulan lamanya.

"Ada yang membuat minyak kelapa kampung tapi tidak bertahan sampai sebulan. Tapi saya bisa mengolahnya bertahan sampai dengan tiga bulan," kata Nenek Biah sembari memperlihatkan sebotol minyak kelapa kampung yang telah selesai ia buat.

Tak hanya itu saja, dalam pengolahan minyak kelapa kampung khas ini, nenek Biah juga menuturkan memakai mantra dalam proses pembuatannya. Mantra-mantra itu berupa kata-kata yang positif dan baik yang ditujukan buat pengolahan minyak sampai selesai dibuat nanti. Karena pada beberapa kasus pembuatan minyak kelapa kampung, banyak orang yang membuatnya tak berhasil seperti yang ia buat.

Misalnya dengan enam buah kelapa Nenek Biah bisa menghasilkan satu botol minyak kelapa kampung; seukuran botol air mineral sedang. Namun kebanyakan orang yang membuat tak bisa mencapai satu botol tadi. Biasanya mereka hanya bisa menghasilkan setengah botol saja.

Dalam keyakinan Nenek Biah, mereka yang mengolah pembuatan minyak kelapa kampung tersebut tidak dengan sepenuh hati, hanya mengejar kuantitas dari pada mengejar kualitas.

"Itulah pembedanya, tak ada mantra lain. Mantra itu berupa harapan, doa, dan perkataan yang baik."

Minyak kelapa kampung yang telah jadi diperuntukkan secara pribadi oleh Nenek Biah untuk kebutuhan sehari-hari, memasak lebih khususnya, dan sebisa mungkin tidak membeli minyak goreng buatan perusahaan yang bersumber dari minyak sawit yang banyak diperjualbelikan di warung-warung.

"Saya punya kelapa sendiri, dan sering rugi, apalagi harga kopra yang tidak pasti dan terus menurun harganya. Tak tahu harus dimanfaatkan bagaimana. Saya kemudian mengolahnya menjadi minyak kelapa kampung," kata Nenek Biah.

Selain diperuntukkan untuk makanan, minyak kelapa kampungnya bisa juga digunakan untuk minyak urut bagi siapa saja yang mau menggunakannya. Bahkan, banyak kalangan pejabat yang memesan minyak kelapa kampung Nenek Biah hanya untuk dijadikan minyak urut semata.

Tradisi membuat minyak kelapa ini diwarisi oleh Nenek Biah dari keluarganya terdahulu, dan terus dilakukannya sampai dengan sekarang. Tak ada masalah yang muncul ia dapati dalam hal persediaan minyak kelapa di dapurnya. Ketika minyak kelapa buatannya habis, ia mulai mengolahnya lagi.

Nenek Biah telah memberikan contoh bagaimana mengolah sumber daya yang ada di sekitar sesuai dengan kebutuhan sehari-hari, dan tak mengejar kemapanan ekonomi yang selalu diinginkan oleh kebanyakan orang. Nenek Biah memilih hidup secara mandiri dalam pemenuhan kebutuhan hidupnya sehari-hari.\*\*\*

## Bab 4

### Kemarau Melanda, Bitule Jadi Penyangga

Tanggal spesial masyarakat di dusun Juriya adalah 10 Desember 2010. Tepat di tanggal itu, wilayah mereka resmi menjadi sebuah desa hasil pemekaran dari desa Totopo. Setelah memiliki administrasi pemerintahan sendiri, desa Juriya kini membagi diri menjadi tiga dusun, yaitu dusun Juriya Utara, dusun Juriya Selatan, dan dusun Karya Tani.

Desa Juriya memiliki luas sekitar 900 hektar, dengan jumlah penduduk sebanyak 694 jiwa atau jumlah Kepala Keluarga (KK) sebanyak 231. Secara geografis, desa Juriya dikelilingi oleh pegunungan. Pegunungan tersebut beberapa diantaranya dijadikan lahan olahan pertanian oleh warga sekitar, meskipun berada pada posisi yang sangat miring.

Tabel 1. Data Jumlah Penduduk dan Jumlah KK Desa Juriya

Dusun	Jumlah KK	Jumlah Penduduk/Jiwa
Juriya Utara	134 KK	410 Jiwa
Juriya Selatan	38 KK	106 Jiwa
Karya Tani	59 KK	178 Jiwa
<b>Total</b>	231 Jumlah Kepala Keluarga yang ada di Desa Juriya	694 Jiwa yang ada di Desa Juriya

Sumber Data: Pemerintah Desa Juriya

Rata-rata lahan pertanian yang ada di Juriya berada pada kemiringan di atas 30-50 derajat. Tutupan hutan ataupun pohon pelindung nyaris tak ada dalam setiap lahan olahan masyarakat. Masyarakat belum begitu menyadari pentingnya mengelola lahan pertanian dengan mengedepankan model pertanian yang berkelanjutan.

Data Pemerintah desa Juriya menunjukkan, tahun 2019-2020 tutupan hutan dan luasan hutan yang ada di desa ini

hanya menyisakan sekitar 125 hektar. Berbanding terbalik dengan lahan perkebunan sebanyak 149 hektar, disusul lahan kering seluas 400 hektar, lahan tidur 112 hektar, dan lahan pekarangan rumah warga sekitar 15 hektar.

“Mayoritas masyarakat di sini mengelola lahan pertanian mereka di lahan miring dan hampir semuanya petani, serta mayoritasnya petani jagung. Jadi tidak heran kalau komoditas pertanian di desa Juriya adalah jagung,” kata Ropandi Asrin Iti, yang belum lama dilantik sebagai kepala desa.

Masyarakat di desa Juriya sudah merasakan dampak akibat pengelolaan lahan yang tidak berkelanjutan tersebut. Pada tahun 2016, banjir bandang menerjang desa Juriya. Meskipun tak ada korban jiwa, tapi dampak yang dirasakan cukup mengejutkan mereka.

Tabel 2. Data Pemanfaatan Pertanian

Dusun	Lahan Kering	Perkebunan	Lahan Pekarangan	Lahan Tidur	Hutan
Juriya Utara	195 Ha	49 Ha	4,9 Ha	68 Ha	73 Ha
Juriya Selatan	25 Ha	10 Ha	0,8 Ha	7,5 Ha	7 Ha
Karya Tani	180 Ha	90 Ha	9 Ha	36 Ha	45 Ha
Total	400 Ha	149 Ha	14,7 Ha (dibulatkan) jadi 15 Ha	111,5 Ha (dibulatkan) jadi 112 Ha	125 Ha

Sumber Data: Pemerintah Desa Juriya

“Desa Juriya sering menjadi langganan banjir di kala musim penghujan tiba. Banjir yang terjadi tahun 2016 merupakan banjir yang cukup besar dan tak akan dilupakan oleh masyarakat Juriya.”

Banjir bandang tahun 2016 itu, salah satunya dipengaruhi oleh kondisi lahan yang kritis, lahan yang digarap berada pada kemiringan, dan kurangnya pohon penyangga. Akibat banjir dan gagal panen, tak sedikit warga yang memilih bekerja di pertambangan emas yang ada di desa tersebut. Kehadiran pertambangan emas itu ikut memperparah kondisi ekologis desa Juriya.

Belajar dari peristiwa itu, sebagian kelompok masyarakat mulai menanam bibit pohon di bibir sungai dan lahan pertanian yang berada di kemiringan. Perlahan, hasilnya mulai dirasakan. Bibit pohon tumbuh menghijau. Aktivitas menanam pohon pun akhirnya terus digalakkan. Inisiatif warga mulai terlihat dengan melibatkan diri mereka dalam menjaga lingkungannya.

Kehadiran Women Institute Research Empowerment – Gorontalo (WIRE-G) yang didukung oleh GEF - SGP Indonesia, ikut memberikan andil. Berkat kerja-kerja pemberdayaan dan pendampingan mereka di desa Juriya, kesadaran warga mulai tampak. WIRE-G juga tak henti-hentinya mengedukasi masyarakat Juriya untuk selalu peduli terhadap lingkungan dan menjaga sumber daya alam di desa.

Mula-mula dengan pembuatan demplot (demonstration plot) untuk pemenuhan bibit pohon dan bibit tanaman, WIRE-G melakukan edukasi untuk masyarakat Juriya, khususnya para petani agar mengelola model pertanian berkelanjutan. Lalu bibit pohon tadi ditanam di lahan warga sebagai pohon penyangga. Selain itu, WIRE-G ikut mendorong agar warga menanam dengan konsep kebun campur atau Agroforestri.



Lokasi penanaman bibit pohon tahunan pada lahan miring dampingan WIRE-G di Desa Juriya (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maliku)

### *Kemarau Panjang*

Di tahun 2019, kemarau panjang melanda banyak wilayah di Indonesia, tak terkecuali di Gorontalo. Di desa Juriya, kemarau berdampak pada kurangnya hasil panen warga. Pada musim tanam sebelumnya, warga juga mengeluhkan hasil panen yang tak membaik. Namun di tahun 2019 menjadi yang terparah. Tanaman jagung yang menjadi komoditas utama tak menyisakan apa-apa. Gagal panen.

Pada tanggal 4 September 2019, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Gorontalo merilis, bahwa setidaknya dampak dari musim kemarau yang panjang di tahun 2019 mengakibatkan sekitar 205 desa di Kabupaten Gorontalo terdampak kekeringan, dan menyebar di 17 kecamatan dari 19 kecamatan yang ada.

Keterangan yang sama juga dikeluarkan oleh Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) Gorontalo. Melalui Kepala Seksi Data dan Informasi BMKG Gorontalo, Wahyu Guru I, mengatakan kekeringan yang terjadi pada tahun 2019 memang lebih kering dibandingkan tahun 2018. Penyebabnya, dipengaruhi oleh El Nino lemah.

“Sebenarnya musim kemarau ini kalau sesuai dengan zona musim yang berlaku, seharusnya terjadi di bulan Juni-Agustus,” katanya. Tapi karena perubahan cuaca yang tidak menentu, ditambah lagi El Nino lemah tadi, membuat musim kemarau bisa sangat panjang dan diprediksikan bisa sampai bulan November. Meski demikian, kemarau panjang yang terjadi di tahun 2019 tersebut tidak terlalu kering seperti yang terjadi pada tahun 2015 silam, karena El Nino yang terjadi di tahun 2015 sangat kuat.

Peristiwa kekeringan di Gorontalo, termasuk yang dialami oleh masyarakat Juriya, menyebabkan kurangnya pasokan air bersih. Hal itu disebabkan sungai tempat mereka mendapatkan pasokan air bersih menjadi kering. Pada bulan itu juga, yakni September 2019, pemerintah Provinsi Gorontalo menanggapi situasi tersebut dengan menetapkan Gorontalo sebagai darurat kekeringan karena telah melanda tiga Kabupaten yang ada di Gorontalo.

Di desa Juriya, selain gagal panen, kemarau panjang membuat pohon-pohon yang belum lama ditanam menjadi tak menghijau lagi. Lahan pertanian masyarakat sangat kering dan beberapa tanaman tumbuh dengan kerdil.

Berdasarkan data yang ada, lahan perkebunan yang diolah masyarakat seluas 149 hektar, tersebar di tiga dusun: Juriya Utara seluas 49 hektar, Juriya Selatan 10 hektar, dan dusun Karya Tani 90 hektar. Luasan perkebunan milik petani di tiga dusun itu tak mendapatkan hasil apa-apa akibat kemarau. Agar dapur tetap mengepul, maka hanya ada satu solusi yang ditempuh oleh petani untuk mengganti kegagalan panen tersebut, yaitu menjadi penambang emas yang ada di desa. Tempat pertambangan tersebut dikenal dengan nama: pertambangan air kuning.

Abd Ziad Arafah staf lapangan WIRE-G di desa Juriya mengatakan, kesadaran masyarakat dalam menghadapi dampak kemarau perlu ditingkatkan lagi, agar dapat membantu dari segi ketahanan pangan yang dimiliki oleh desa. Dari pengelolaan lahan yang berkelanjutan, memanfaatkan hasil olahan pertanian menjadi panganan lokal; serta menjadikan sumber makanan yang secara alami tumbuh di wilayah desa sebagai ketahanan pangan bagi desa itu sendiri.

### *Bitule, Solusi Pangan saat Kemarau*

Minggu, 12 Januari 2020. Sukman Detu bergegas dengan semangatnya menuju hutan yang tak jauh dari belakang rumahnya. Lelaki berusia 41 tahun itu biasa disapa Om Suku. Parang dan karung sudah disiapkan. Tujuannya satu yaitu mencari bitule. Berbeda dengan desa lainnya saat musim kemarau, sebenarnya di desa Juriya punya stok pangan lokal yang dapat membantu warganya ketika bertahan dari paceklik kemarau.

Cadangan pangan lokal itu bernama Bitule. Warga Juriya atau masyarakat Gorontalo pada umumnya, menyebut umbi hutan atau gadung itu dengan sebutan Bitule. Bitule sendiri sudah dijadikan solusi pangan warga Juriya saat musim paceklik melanda, seperti yang dilakukan Om Suku.

“Untuk mencari Bitule di hutan, ada juga yang berangkat dengan tidak membawa peralatan sama sekali. Cukup membawa satu batang kayu yang kuat untuk dijadikan alat menggali Bitule,” kata Om Suku.

Tidak lama kemudian, Om Suku sudah mendapatkan Bitule yang ia inginkan. Sebanyak enam buah Bitule berukuran besar berhasil ia dapatkan hari itu. Satu ukuran Bitule yang didapat bobot timbangannya bisa lebih dari dua kilogram. Proses yang tersulit ialah mengangkat Bitule sampai ke bawah dengan cara dipikul, karena tidak bisa mendorongnya dari ketinggian sampai ke bawah. Hal itu sudah menjadi pantangan yang diyakini warga Juriya.

Cukup mudah mengenali Bitule di hutan. Hanya dengan melihat area tanah yang menggantung kecil atau juga bisa melihat kayu kecil yang berduri mengelilingi setiap batang atau pohon yang ada di sampingnya. Bitule biasanya mengelilingi pohon tersebut dengan melawan arah jarum jam. Setelah menemukannya, kita bisa mulai menggali di sekitarnya.

Bitule yang melimpah di Juriya sayangnya sulit diolah jika bukan di musim kemarau. Karena seperti diketahui, Bitule hanya bisa hidup di musim kemarau dan diolah saat musim itu berlangsung. Meski di musim penghujan ada beberapa Bitule yang hidup, namun saat proses pengeringannya sulit dilakukan. Sebab membutuhkan asupan panas dari sinar matahari.

Setelah melewati proses menurunkan Bitule dari atas gunung yang begitu sulit, Om Suku kemudian disambut hangat oleh istrinya, Salma Husain. Bitule tersebut sesegera mungkin dibersihkan sang istri, mulai dari membersihkan kulitnya, sampai pada proses pengeluaran racun yang ada dalam Bitule.

Jika terjadi kesalahan dalam pembersihan dan pemisahan Bitule dengan racun di dalamnya, maka tidak dapat dikonsumsi. Dampak yang dirasakan dari kesalahan pembersihan Bitule itu saat dikonsumsi adalah sakit kepala, pusing, suhu badan akan naik, dan bisa berdampak gatal-gatal pada kulit.

Ma Salu, panggilan akrab istri Om Suku, punya cara tersendiri saat memisahkan racun dari Bitule, yaitu dengan mencampur Bitule bersama garam atau abu bekas pembakaran. Bitule sendiri butuh sinar matahari yang sangat panas untuk membuat ia kering. Dengan maksimal penjemuran memerlukan waktu hingga 3 hari.

Rupanya proses membuat Bitule hingga siap santap membutuhkan waktu yang lama, bahkan sampai seminggu. Mulai dari pengambilan di hutan, dipotong kecil persegi, dicuci dengan garam, setelah itu dijemur selama 2-3 hari; kemudian dilumuri dengan abu bekas pembakaran, direndam seharian, selanjutnya dimasak. Saat Bitule masuk dalam wajan penggorengan, dan ketika dirasa sudah matang, segera dicampur dengan gula merah. Setelah itu, Bitule sudah siap dikonsumsi sebagai panganan di musim kemarau.

Selain Om Suku, banyak warga termasuk kaum perempuan desa, sering ikut ke hutan untuk mencari Bitule. Di musim kemarau tiba atau di musim paceklik, warga biasanya membuat Bitule sebagai panganan wajib, sehingga dengan demikian, Bitule telah menjadi solusi ketahanan pangan saat di musim kemarau.

Untuk alasan itulah, sangat mudah menemukan Bitule di lemari atau dapur rumah warga di desa Juriya, seperti yang terlihat di rumah Rabiah Adenga. Perempuan yang biasa dipanggil dengan sebutan Nenek Biah itu, memperlihatkan stopless yang terisi penuh Bitule, tertutup rapat, dan berjejer rapi.

“Kalau di musim kemarau hampir setiap rumah punya Bitule. Beberapa stok bitule yang saya punya dari kemarau tahun kemarin, bahkan masih tersimpan rapi di lemari. Bitule yang saya punya itu saya isi dalam sebuah kaleng,” kata Rabiah Adenga saat ditemui di rumahnya sore itu.

Selain Rabiah Adenga, ada juga Aldo Itti, pemuda di desa Juriya yang sudah mempunyai stok Bitule. Menurutnya, setiap kemarau tiba pasti masyarakat desa sudah menyiapkan Bitule untuk dimasak dan kemudian dimakan secara beramai-ramai.

“Bitule sudah kami konsumsi dari dulu. Tapi yang harus dipikirkan bagaimana mengolah Bitule di musim penghujan menjadi sumber makanan.”

Abd Ziad Arafah dari WIRE-G mengatakan, untuk mendapatkan Bitule di desa Juriya sangat gampang dan tersebar di seluruh kawasan area hutan yang ada di desa. Bitule telah menjadi satu-satunya sumber ketahanan pangan lokal yang ada di desa Juriya.

Menurutnya masyarakat Juriya sangat bergantung pada hasil pertanian utama yang condong ke satu komoditas, yaitu jagung. Ketika musim kemarau melanda dan hasil panen tak memuaskan, maka juga berdampak pada faktor pemenuhan ekonomi setiap kepala keluarga. Saat kebutuhan ekonomi menipis, serta kebutuhan pangan harus terus dipenuhi, masyarakat harus mulai dengan sadar memanfaatkan hasil bumi yang tersimpan, yang begitu dekat keseharian mereka.

“Sistem ketahanan pangan lokal saat musim kemarau atau musim paceklik tiba di desa Juriya adalah Bitule. Potensi ini harus dimanfaatkan,” kata Ziad.\*\*\*

## Bab 5

### Belajar dari Bencana

**M**edio tahun 1997. Sebuah kabar menggiurkan membuat ratusan orang mendatangi wilayah yang disebut gunung air kuning. Mereka adalah penambang emas yang datang dari berbagai daerah. Wilayah itu dikemudian hari menjadi bagian dari desa Juriya, kecamatan Bilato, kabupaten Gorontalo. Kala itu, gunung air kuning seolah menjadi “tanah harapan” bagi siapa saja yang ingin mendulang emas.

Roman Iti (43) saat itu masih remaja. Setelah tamat dari bangku Sekolah Menengah Pertama (SMP), ia lebih banyak menghabiskan waktu membantu orang tuanya berkebun. Sesekali, ia juga mencoba peruntungan dengan pergi menambang untuk membantu perekonomian keluarga.

Awalnya Roman mengaku hanya ikut-ikutan, penasaran, karena melihat banyak yang pergi ke air kuning pulang dengan membawa banyak emas. Penambang merupakan pekerjaan utama masyarakat Juriya saat itu. Selepas menanam di kebun, biasanya mereka langsung beranjak ke lokasi pertambangan. Apalagi jaraknya tidak terlalu jauh. Hanya berkisar 10 kilometer dari pusat desa.

“Ada banyak lubang di gunung AirKuning. Hampir semua rumah tangga (atau kelompok) memiliki lubang tambang masing-masing,” kata Roman.

Saking banyaknya, ia menggambarkan area gunung tersebut terlihat seperti sarang semut karena penuh lubang. Dalam kacamata pemerintah, mereka biasanya disebut PETI atau Penambang Emas Tanpa Izin.

“Ada ratusan penambang silih berganti menggali.”

Fenomena konversi petani menjadi penambang merupakan salah satu tantangan bagi ketahanan pangan. Kondisi krisis moneter di Indonesia yang terjadi pada periode itu, turut melatar-belakangi banyak warga menjadikan tambang sebagai pelarian.

Di masa suram finansial, tentu warga akan melakukan apa saja untuk mencari pendapatan demi memenuhi kebutuhan hidup. Meski begitu diungkapkan Roman, harga emas saat itu sangat murah. Lebih murah dari harga satu bungkus rokok saat ini hanya 15 ribu rupiah per kilogram.

“Apalagi hasil kebun?!” ujar Roman, mempertanyakan ketimpangan sosial yang membuat mereka, para petani terpaksa harus beralih menjadi penambang, semata untuk bertahan hidup.

Seiring waktu, setelah dieksploitasi habis-habisan, stok kandungan emas di area penambangan pun mulai habis. Tak seperti sebelumnya, para penambang mulai kelimpungan mendapatkan emas. Warga luar daerah gulung tikar, sedangkan warga lokal tak ada pilihan lain selain kembali bertani.

Namun, selaras dengan itu, dampak aktivitas penambangan mulai dirasakan warga. Problem nyata hari ini adalah ancaman kehancuran lahan pertanian, terutama lahan di sekitar pertambangan. Keberadaan tambang di Juriya telah merusak sistem pertanian dan lahan pertanian masyarakat. Hal itu terjadi akibat keberadaan tambang yang berbatasan langsung dengan pemukiman dan lahan pertanian masyarakat.

Perlahan mereka mulai sadar dan belajar dari kenyataan yang telah menimpa mereka. Masing-masing dari mereka, seolah sadar bahwa petani seperti Roman dan lahan pertanian mereka, adalah masa depan kedaulatan pangan. Tentu saja keyakinan mengenai kesejahteraan petani dan kedaulatan pangan itu, tidak serta merta datang begitu saja. Akan tetapi, lewat sebuah proses panjang: bagaimana masyarakat mempertahankan hidup dari subsisten menuju pertanian mandiri dan berkelanjutan.

Seperti yang dilakukan Roman. Ia sudah tidak pernah lagi menginjakkan kakinya di tambang. Kesadaran akan dampak negatif tambang terhadap lingkungan, telah ia rasakan sendiri. Rumahnya terporak poranda akibat banjir bandang yang terjadi tahun 2016 silam.

Seturut dengan itu, kehadiran Wire-G (Women Institute Research Empowerment- Gorontalo) yang didukung oleh GEF SGP Indonesia, ikut berperan memberikan penyadaran mengenai pentingnya ketahanan pangan dan alternatif tersendiri bagi perekonomian keluarga Roman, juga para petani lain. Istri Roman, Neli, bahkan tergabung dalam kelompok pengolahan stik jagung yang dibentuk Wire-G.

Selama ini, Gorontalo memang dikenal sebagai sentra jagung nasional. Bahkan, belum lama ini, Gorontalo memecahkan rekor produksi komoditas jagung sepanjang tahun 2019 dengan angka sebesar 1,7 juta ton. Capaian ini meningkat dari tahun sebelumnya yang memproduksi 1,56 juta ton dari total area panen seluas 343.241 hektar.

Namun faktor cuaca ikut menentukan rendahnya produktivitas. Karena dengan cuaca buruk petani dapat menyebabkan tertundanya musim tanam atau bisa jadi gagal panen. Seperti yang dialami petani Gorontalo saat dilanda kekeringan berkepanjangan tahun 2019 lalu.

Menurut data dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Gorontalo, ditaksir ada 330 hektar sawah dan 1.850 hektar lahan jagung yang terdampak. Kondisi ini membuat pemerintah provinsi Gorontalo menetapkan siaga darurat.

Selain itu, salah satu isu utama di tingkat petani jagung adalah ketidakstabilan harga jual jagung. Sampai saat ini harga jagung di tingkat petani belum mempunyai patokan Harga Pembelian Pemerintah (HPP) sebagaimana padi atau beras. Dengan kondisi demikian, harga jagung mengikuti mekanisme pasar yaitu hukum supply and demand.

Di luar semua dinamika itu, kini Roman fokus bertani lagi. Hasil panen jagung sudah dirasa cukup untuk kebutuhan rumah tangganya. Aktivitas kesehariannya, saat ini lebih banyak dihabiskan membantu istri mengolah stik jagung. Begitu pula sebaliknya, sang istri membantu Roman dalam mengolah lahan pertanian. Keduanya saling topang.

Ia tak lagi bergantung dengan penambangan yang berisiko besar. Bersama warga lain, Roman mulai menerapkan sistem pertanian berkelanjutan yang gencar disosialisasikan oleh Wire-G berupa penanaman tanaman tahunan di setiap lahan pertanian. Mengingat, desa Juriya juga merupakan desa yang rawan bencana alam. Dengan melakukan pertanian mandiri dan berkelanjutan, Roman telah mewariskan kearifan lingkungan kepada anak dan cucunya.

### *Memulihkan Desa Rawan Bencana*

“Tanggul jebol! Tanggul jebol! Tanggul jebol!”

Suara teriakan salah seorang warga, seketika mengagetkan Ronaldo Iti (22) yang sedang rebahan santai di sofa ruang tengah. Ia segera bangkit. Berlari menuju pintu. Di

hadapannya, jalanan mulai tertutup air berwarna kuning kecoklatan. Tetangga-tetangganya berlarian ke luar rumah.

Sementara itu langit berangsur gelap. Waktu menunjukkan pukul 18.45 WITA. Aldo, sapaannya, bergegas memberitahu sang ibu yang sedang berjibaku di dapur. Situasi tambah panik. Dalam hitungan menit air sudah berada di beranda rumah, mulai menyeruak masuk. Mereka saling kejar dengan waktu.

Tiba-tiba air menyentuh betis Aldo. Ia melihat ibunya membawa dokumen-dokumen ijazah miliknya. Tak banyak yang bisa diselamatkan memang. Mereka tak ingin mengambil risiko, dan sesegera mungkin meninggalkan rumah. Mengamankan diri ke dataran tinggi.

"Atap-atap rumah sudah rata dengan air. Kita hanya bisa meratapi," kata Aldo, menceritakan memori kelam ketika banjir bandang menghantam desa Juriya, tahun 2016 silam.

Banjir saat itu terjadi akibat intensitas hujan tinggi yang selama beberapa hari sehingga mengakibatkan air sungai Paguyaman meluap. Secara geografis, desa Juriya berada tepat di perbatasan kabupaten Gorontalo dan kabupaten Boalemo. Jalan dan pemukiman warga diapit oleh sungai dan kawasan pegunungan. Desa ini merupakan muara sungai Paguyaman, salah satu sungai terbesar di Gorontalo.

Tak salah memang jika menyematkan label desa Juriya sebagai desa paling rawan bencana. Hal itu sangat nampak ketika memasuki desa. Di pinggiran jalan, akan banyak ditemui plang atau papan peringatan bertuliskan "rawan longsor dan "rawan banjir". Belum lagi dengan adanya pemandangan lahan jagung milik warga yang ditanam di kemiringan, pada lereng-lereng gunung yang curam.



Tulisan papan plang atau papan peringatan "rawan longsor dan "rawan banjir" di pinggiran jalan Desa Juriya (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maliku)

Kesalahan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya lahan di daerah pegunungan, dapat menimbulkan kerusakan atau cekaman biofisik, berupa degradasi kesuburan tanah dan ketersediaan air. Dampaknya, tidak hanya dirasakan oleh masyarakat di lahan pegunungan, tetapi juga di dataran rendah.



Kondisi sungai di desa Juriya pasca banjir Juli 2020 (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maliku)

Tingginya erosi permukaan yang terjadi pada lahan pertanian jagung, mengindikasikan tingginya kehilangan hara, sehingga akan menurunkan tingkat produktivitas tanaman pada musim tanam berikutnya.

Pemerintah provinsi Gorontalo melalui gubernur Rusli Habibie, bahkan telah mengeluarkan kebijakan melarang petani memanfaatkan lahan untuk pertanian dengan kemiringan sekitar 30 derajat, karena rawan akan longsor, dan sebagai salah satu alternatifnya akan ditanami tanaman tahunan seperti kemiri, cengkih, dan lainnya.

Persoalan yang dihadapi saat ini memang cukup kompleks. Lahan yang cocok untuk kawasan pertanian sudah sangat berkurang dan terbatas keberadaannya. Sehingga kebanyakan masyarakat menggunakan lahan pertanian dan kurang mengindahkan konservasi tanah yang memadai. Padahal, hal ini justru dapat berpengaruh terhadap menurunnya tingkat produktivitas tanah pertanian tersebut. Bahkan lebih dari itu, akan mengakibatkan bencana alam.

Trauma banjir dan longsor yang dialami oleh warga desa Juriya, dengan sendirinya memupuk kesadaran kolektif mereka dalam menjaga lingkungan. Sebagai salah satu pemuda di desa Juriya, Aldo kini aktif melakukan sosialisasi mengenai pentingnya menerapkan sistem agroforestri kepada para petani di kampung.

"Alhamdulillah, kemarin kita membagikan ratusan bibit tanaman tahunan ke para petani. Respon mereka baik. Banyak yang mulai menanam bibit-bibit itu, kita juga ikut mendampingi mereka," katanya.

Aldo yang masih berstatus sebagai mahasiswa jurusan hukum di Universitas Negeri Gorontalo (UNG) ini, gencar mengorganisir para pemuda desa untuk berperan dalam upaya pemulihan lingkungan mereka. Jika bencana adalah peringatan dari alam, maka masyarakat Juriya telah menerima pesan peringatan itu dan mulai berbenah belajar dari bencana.

\*\*\*

## Bab 6

### Kisah Bunaeri:

# Menanam dengan Hati di Lahan Kering Transmigrasi

Suara ayam mengalun merdu ketika matahari perlahan terbit dari ufuknya. Satu per satu pintu rumah warga di SP3 Pabuto mulai terbuka. SP3 adalah sebuah dusun program transmigrasi di desa Saritani, kecamatan Wonosari, kabupaten Boalemo, provinsi Gorontalo. SP3 akronim dari Satuan Permukiman 3.



Kondisi lahan dan pemukiman warga transmigrasi di SP3 Desa Saritani, Boalemo (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maluku)

Dari sekian rumah warga, tampak seorang lelaki sedang sibuk menyiapkan keperluan untuk kebunnya. Namanya Bunaeri, usianya 51 tahun. Pagi itu ia telah menyiapkan tahu goreng olahan sendiri sebagai bekal makanan nanti. Semua pekerjaan domestik dilakukan sendiri. Maklum, Bunaeri adalah duda dengan dua anak lelaki dan satu perempuan yang mau tak mau harus menjalani peran

ganda; melakukan semua pekerjaan di dapur, sumur, dan kebun.



Bunaeri sedang bekerja di kebun miliknya bersama anggota kelompok Marsudi Lestantun SP3 Desa Saritani (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Malik)

Bunaeri berasal dari Temanggung, Jawa Tengah. Sejak lama ia ingin mengikuti program transmigrasi. Mula-mula ketertarikannya itu diungkapkan saat pertama kali mendengar program transmigrasi di era pemerintahan Soeharto. Namun ia terkendala informasi dan tak tahu bagaimana cara mendaftar. Barulah di tahun 2016, niat itu terwujud melalui informasi dari seorang kawannya. Ia berhasil mendaftarkan diri bersama anak-anaknya.

Waktu menunjukkan pukul 06.00 pagi. Cangkul, bekal, dan sebotol air minum telah siap. Beberapa jam lagi Bunaeri akan beranjak menuju kebunnya, setelah tugas-tugas tambahannya selesai dikerjakan. Di setiap perjalanan menuju kebun, lahan-lahan kering dan miring adalah pemandangan yang lazim terlihat. Tak ada kicauan burung yang terdengar, barangkali karena burung-burung telah terpenjara sangkar di rumah-rumah warga.

Dengan kaos lusuh, celana pendek, dan topi sebagai pelindung dari sengatan matahari, Bunaeri berjalan tanpa alas kaki menuju kebun. Hanya dibutuhkan waktu sekira 20 menit ke kebun dengan melewati sungai kecil dan pohon tumbang membentang, Bunaeri segera mengeluarkan parang.

Di kebunnya yang memiliki kemiringan sekitar 45 derajat, ia langsung membersihkan semak-semak. Setelah itu, mengambil cangkul, dan segera mungkin membuat lekukan kebun bertingkat yang menyerupai jalur air.

"Ini yang disebut terasering," kata Bunaeri.

Terasering adalah teknik bercocok tanam dengan model bertingkat-tingkat. Bagi Bunaeri, metode ini bukanlah hal baru. Selain berfungsi membuat ruang untuk jalan, juga bisa berfungsi menyuburkan tanaman. Konsep itu ia tahu dari orang tuanya dan juga dipraktekkan ketika masih di Pulau Jawa; seperti di Dieng, Purworejo, dan Yogyakarta.

Baginya, tak ada yang salah mengolah lahan miring, asal tahu caranya. Selain itu butuh kesabaran dan ketekunan.

"Karena sekali kita mengelola dengan metode yang salah, kita akan kalah selamanya," ucapnya.

Mulanya Bunaeri kaget ketika pertama kali melihat lahan miring yang saat ini sedang ia kelola. Cerita itu bermula ketika ia datang pertama kali menginjakkan kaki sebagai penduduk transmigran. Saat itu, 1 Januari 2017, ia bersama rombongan lainnya datang dengan sejuta harapan, yakni ingin mengubah nasib agar lebih baik lagi.

Namun belum sampai mobil yang membawa mereka tiba di lokasi penempatan, Bunaeri menggelengkan kepala ketika melihat lahan miring, tandus, dan hanya satu jenis tanaman yang terlihat yaitu jagung.

"Sungguh kontras dengan kontur lahan di daerah asal saya. Di sini lahan-lahannya sangat miring. Kebanyakan tanaman jagung, tapi setelah memasuki daerah SP1 justru berganti dengan sawit, lalu kembali berganti dengan pegunungan yang cukup miring."

Dalam perjalanan itu ia banyak diam. Dalam pikirannya Bunaeri berkata, "jangan-jangan ini yang akan jadi tanah olahan kita?". Benar saja, lahan miring itu adalah kenyataan yang harus ia hadapi.

Setelah sampai di lokasi, Bunaeri beserta rombongan lainnya yang disebut sebagai warga TPA (Transmigrasi Penduduk Asal) dikumpulkan di aula. Mereka mendengarkan arahan dan penyampaian dari Kepala Unit Pelaksana Tugas (KUPT) program transmigrasi, Dinas Transmigrasi, provinsi Gorontalo. Dengan seksama mereka mendengarkan penyampaian bahwa setiap Kepala Keluarga (KK) akan mendapatkan Jatah Hidup (Jadup) untuk dapat menopang kebutuhan keluarga, sampai dengan mampu membiayai kebutuhan hidup di tahun-tahun akan datang.

Jadup tersebut terdiri dari Lahan Usaha 1 (LU1) seluas 1 hektar yang siap diolah, Lahan Usaha 2 (LU2) seluas 1 hektar yang masih dalam keadaan rimbun; ditambah sembako, rempah-rempah, ikan garam, minyak dan kebutuhan dapur lainnya. Jadup yang diberikan berlaku selama satu tahun. Sementara untuk pengelolaan lahan usaha akan diberikan setelah warga menempati kawasan transmigrasi selama 3 bulan. Selbihnya, warga terlebih dahulu mengolah lahan pekarangan menjadi kebun kecil untuk mereka tanami apa saja.

Mendengar itu, Bunaeri yang memiliki latar belakang buruh tani yang tak punya lahan, sangat bahagia. Terlebih mendapat bantuan selama setahun. Saat tahu bahwa mereka akan mendapat lahan usaha, ia sudah memikirkan akan seperti apa pengelolaannya, meski lokasinya pada kemiringan.

Sayangnya, setelah tiga bulan berlalu, lahan yang dijanjikan tak kunjung terlaksana. Barulah tujuh bulan kemudian, ia bisa mengolah LU1 miliknya. Tapi ia sempat heran, selain miring, lahan olahannya sangat sedikit pohon.

"Pasti akan panas di sini kalau siang hari, dan tanaman juga kalau saat pakeklik tiba akan lambat pertumbuhannya, bahkan mati," pikirnya.

Jika tidak dikelola dengan baik, kemiringan lahan dan kurangnya pepohonan itu bisa berisiko bagi dirinya sendiri, dan juga pemukiman warga dusun SP3 yang secara

geografis letaknya tak jauh berada di bawah lahan mereka. Maka pilihannya adalah mengelola lahan dengan konsep terasering tadi.

Lahan satu hektar itu segera ia kelola, dan tak lupa sambil menanam pohon sebagai penyangga untuk menjaga lahan yang berada pada kemiringan itu agar tidak cepat erosi. Dengan adanya pohon, Bunaeri bermaksud mengajak burung-burung agar bisa bermain di area perkebunannya, dan bisa mendengar kicauan mereka sembari bekerja di lahan.

“Saya sangat suka suara burung, apalagi kicauannya di pagi hari. Nikmat rasanya bekerja sambil ditemani suara burung. Begitu pun dengan pohon, bisa jadi tempat berteduh saat istirahat.”

\*\*\*

Bunaeri meyakini, mengelola lahan dengan konsep terasering memiliki prinsip keberlanjutan lingkungan. Sementara model pertanian yang dilakukan oleh kebanyakan orang, menurutnya, hanya memikirkan untungnya saja tanpa memikirkan sisi ekologisnya.

“Sebenarnya saya terbiasa jadi petani di lahan yang datar seperti persawahan, bukan di bukit seperti ini. Jadi ini tantangan yang harus saya lalui. Setelah saya datang ke sini, harus ada yang saya lakukan. Saya ingin membawa perubahan,” katanya.

Selain menerapkan konsep terasering, Bunaeri juga menerapkan konsep agroforestri atau pengelolaan lahan dengan cara kebun campur. Ia bermaksud memberikan contoh sekaligus menyadarkan petani lainnya agar tidak selalu bergantung pada satu jenis tanaman, sehingga petani bisa merasakan keuntungan dari tanaman yang lainnya juga.

Di lahannya, Bunaeri tidak hanya menanam jagung, tapi juga menanam cabai rawit, ubi jalar, kacang panjang, dan bawang.

“Ini sebagai ketahanan bagi petani, jika jagung yang kita tanam tidak bisa maksimal hasilnya saat panen. Apalagi permainan harga di tengkulak, petani yang merugi. Kita bisa diberi keuntungan pada tanaman pendukung lainnya.”

Inisiatif Bunaeri mengelola lahannya dengan model kebun campur itu mendapat dukungan dari GEF - SGP (Global Environment Facility - Small Grants Programme), sebuah program yang dikelola untuk mengurangi tantangan lingkungan bersama dengan komunitas, termasuk di kawasan Sungai Paguyaman dan kawasan penyangga Suaka Margasatwa Nantu Boliyohuto: sebuah kawasan yang penting bagi keanekaragaman hayati, lingkungan hidup, serta kelangsungan hidup manusia di sekitarnya.

Dalam bercocok tanam, Bunaeri sangat menjaga kesuburan tanahnya. Sebagai contoh, dalam hal pemakaian pupuk, ia memakai pupuk buatan sendiri, yaitu pupuk organik atau pupuk alami. Ia sadar jika menggunakan pupuk kimia, hanya akan mematikan unsur hara tanah dan tanah cepat rusak, sehingga tidak bisa digunakan untuk beberapa tahun yang akan datang.

Lahan dengan model terasering Bunaeri sempat disepelekan oleh petani lainnya di SP3. Ia sering mendengar celoteh dari mereka yang meragukan model pertaniannya yang disebut hanya menguras waktu, dan tak dapat memberikan hasil panen yang begitu cepat. Ketika petani lain sedang panen jagung, ia masih berkuat dengan pembuatan terasering. Namun waktu jualah yang menjawab semua cibiran itu.

“Kami mengelola lahan dalam rentang waktu yang sama. Memang mereka panen lebih awal, tapi lahan mereka selalu erosi jika musim hujan karena tak ada penyangga. Yang tersisa hanya batu-batu dan tanahnya dibawa air hujan ke bawah,” cerita Bunaeri.

Hingga akhirnya, warga yang menyepelekan itu kini mulai sadar saat melihat hasil pertaniannya dengan model terasering. Bahkan beberapa petani mulai belajar bersama membuat terasering. Bunaeri kemudian menjadi sosok yang

memberikan edukasi dan pemahaman bagi warga SP3 lainnya, soal bagaimana menjaga lahan agar tetap bertahan dan bisa digunakan sampai beberapa tahun yang akan datang.

Risiko yang akan mereka alami juga sangat tinggi, karena nyawa juga menjadi ancaman bila model pertanian tak dijalankan secara baik dan benar.

“Dengan adanya terasering, dapat mengurangi risiko petani terpeleset di lahannya sendiri, apalagi saat hujan turun.”

Sebagai generasi pertama warga transmigran di SP3, Bunaeri berharap apa yang dilakukannya bisa menjadi contoh pertanian yang berkelanjutan di Gorontalo, yaitu dengan cara lahan yang dteras, menggunakan model pertanian kebun campur, serta menanam pohon sebagai penyangga agar tidak terjadi erosi pada tanah.

“Kalau kita tinggal di tanah yang datar, kita harus belajar berjalan, tapi kalau kita tinggal di area pegunungan, kita harus belajar mendaki. Artinya bukan hanya kita saja belajar, tapi belajar bersama makhluk hidup yang ada di sekitarnya juga.”

Bunaeri mengucapkan kalimat arif itu ketika berhenti mencangkul dan segera beristirahat sambil mencicipi tahu buatannya yang ia bawa dari rumah.



Lahan terasering yang dipraktikkan oleh Bunaeri Bersama anggota kelompok Marsudi Lestantun SP3 Desa Saritani (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maliku)

### *Berbicara dengan Tanaman*

Hari itu, Bunaeri berbicara kepada tanamannya. Namun kata-katanya berupa doa dan juga harapan. Dengan setengah berbisik ia berkata, "Selamat bagi yang menanam dan selamat juga untuk yang ditanam". Tangannya kemudian menyentuh tanah. Jika sedang sendiri di kebun, Bunaeri tampak seperti orang gila. Sebab ia akan berbicara dengan tanaman, bahkan mencumbui tanamannya.

Hampir setiap hari ia memperlakukan tanamannya seperti itu. Baginya, hal itu merupakan ungkapan kasih sayang seorang petani kepada tanaman yang ia jaga dan rawat.

"Saya percaya, tanaman yang kita tanam itu meskipun tidak bisa bicara tapi dia bernyawa dan memiliki rasa. Jadi kalau dia bernyawa harus dirawat dengan kasih sayang," katanya sambil memegang kacang panjangnya yang tumbuh subur.

Selain kacang panjang, tampak tanaman jagung, bawang merah, ubi jalar, dan juga cabai rawit. Sementara tanaman tahunan yang dalam tahapan perawatan adalah kakao dan

kopi. Bunaeri percaya, berinteraksi dengan semua tanaman-tanamannya akan menghasilkan yang baik juga. Ia menggalakan sistem kebun campur dengan tujuan keberlangsungan pertanian, agar kelak para petani tidak berpatokan pada satu tanaman saja, tapi ada tanaman lain yang menunjang untuk dipanen, dan bisa menghasilkan pendapatan tambahan juga.

“Saya menanam jagung, satu bulan kemudian menanam cabai, 3 minggu berikutnya menanam kacang panjang, ubi jalar, dan bawang. Biar ada jeda untuk tiap kali panen. Saya juga menanam kopi dan kakao untuk tanaman tahunannya,” kata Bunaeri.

Sementara keberadaan ubi jalar di lahan pertaniannya dapat menekan laju pertumbuhan rumput yang akan menjadi hama bagi tanaman. Rumput tersebut dicabut, dibersihkan, kemudian ditumpuk di bawah tanaman. Tanpa harus membakarnya, rumput itu berfungsi sebagai pupuk alami. Dengan model seperti itu, lahan yang diolah Bunaeri terlihat lebih rindang dibandingkan dengan yang lain, pohon-pohon berdiri tegak dan berfungsi sebagai penyangga.

### *Berdamai dengan Satwa*

Suatu ketika, saat matahari pagi mulai berpendar, Bunaeri berjalan ke arah kebunnya. Sesampainya di sana, ia kaget bukan kepalang. Pasalnya, tanaman yang ia rawat sepenuh hati dengan rasa kasih sayang itu rusak. Seperti ada yang mencuri dan menghamburkannya. Tanaman tercecer di mana-mana, sementara ubi jalar tampak habis di makan. “Saya awalnya mengira ini dirusak oleh manusia, tapi saya berpikir kembali, tak pernah melakukan hal yang tidak baik kepada warga dusun, apalagi merusak kebun mereka sampai ada balasan seperti ini.”

Karena kawasan ini merupakan hutan yang dibuka untuk ditinggali, maka dugaannya langsung tertuju pada satwa seperti babi hutan dan monyet. Untuk membuktikan dugaan itu, Bunaeri mulai mengubah jam berangkat ke kebun. Ia datang sebelum fajar memerah di langit timur, dengan tujuan bisa mendapati siapa pelaku sebenarnya perusak tanamannya.

Usahanya ternyata tak sia-sia. Bunaeri segera mendapati pelakunya. Benar saja, monyet dan babi hutan beraksi di pagi hari, dan pulang setelah melahap tanaman yang ada di lahannya. Mereka silih berganti masuk ke area kebun. Tak banyak memilih tanaman, apa yang di tanam, itulah yang mereka makan.

“Awalnya saya kesal. Tapi lama kelamaan saya memahami mereka juga makhluk hidup sama seperti kita.”

Menurutnya, tidak bisa selamanya menyalahkan monyet dan babi yang merusak tanaman. Mereka hanya mau mengambil apa yang mereka inginkan saja, dan tidak perlu membalas dengan keras karena justru akan menghasilkan dampak yang negatif. Sebab satwa itu nantinya akan datang kembali secara bergerombol, serta merusak lebih banyak lagi.

Setelah kejadian yang menerpa kebunnya itu, Bunaeri kemudian memilih berdamai dengan perasaan kesalnya. Alih-alih memasang perangkap seperti jerat atau mengusir memakai bunyi-bunyian, Bunaeri justru berbagi dengan satwa-satwa itu. Setiap pagi penampakan babi dan monyet memakan tanaman adalah peristiwa yang wajar terjadi di kebunnya.

Maka pemandangan berbagi makanan dengan monyet dan babi hutan adalah hal yang biasa bagi Bunaeri.

"Kalau kedatangan ada monyet dan babi yang masuk, saya tinggal berteriak dari jauh: *'makan saja, tak ada yang marah. Asalkan jangan ambil semuanya'*."

Setelah saya cek, satwa itu memang tak memakan semuanya," ujar Bunaeri.

Pernah suatu ketika, ia melihat babi hanya berjarak sekira lima meter dengannya, dan keduanya saling tengok. Kemudian babi itu dengan santai memakan ubi jalar yang baru saja ditanam dan didoakan agar selamat, dan semuanya habis begitu saja. Ia tak sedikitpun mengusir babi itu, namun baginya itu sudah menjadi bagian dari satwa-satwa liar di sekitar. Bunaeri menghibahkan separuh lahannya kepada satwa liar.

"Saya tidak menganggap mereka hama. Saya juga tak mau berkonflik dengan mereka. Mereka juga mahluk hidup yang butuh makan dan bertahan hidup. Untuk itu saya ingin berbagi dengan mereka," tutup Bunaeri mengakhiri ceritanya.

\*\*\*

## **Bab 7**

### **Warga Transmigrasi Membangun Ketahanan Pangan**

**R**aut wajah Siti Khalimah tampak resah. Perempuan 46 tahun itu tak habis pikir. Pisang dan singkong hasil kebun suaminya yang melimpah, harganya malah turun drastis. Harga singkong perkilogram hanya 1.000 rupiah. Jika lagi bagus, harganya bisa mencapai 10.000 rupiah. Untuk pisang sendiri, satu tandan dihargai 5.000 rupiah hingga 10.000 rupiah.

Irmanto, sang suami, merasa rugi. Hingga akhirnya, hasil kebun pasangan suami istri yang melimpah itu dibiarkan masak sampai membusuk. Pisang dan singkong itu pun terbangung percuma, atau diberikan kepada warga lainnya sebagai pakan ternak.

“Singkong dan pisang kalau dijual pun tidak akan laku semuanya. Sisanya sangat banyak,” cerita Siti Khalimah.

Namun keresahan itu tidak berlangsung lama. Siti segera memutar otak agar kelimpahan hasil kebun yang dianggap sia-sia itu, harus dijadikan sebagai peluang bernilai ekonomis. Maka dengan cepat ia membuat makanan dari olahan pisang dan singkong tadi. Caranya dengan membuat keripik pisang dan singkong lalu dijual ke masyarakat sekitar.

“Lumayanlah bisa membantu perekonomian keluarga. Apalagi anak saya mulai sekolah, dia butuh jajan dan biaya sewa transportasi untuk ke sekolahnya,” kata Siti.

Awalnya, ada rasa keraguan dalam benak Siti ketika membuat keripik. Pasalnya pasti akan bersaing saat dijual ke pasaran. Karena ia menduga, warga lainnya juga pasti punya hasil kebun yang sama dan diolah menjadi keripik untuk dijual.

“Tapi, saya tetap mencoba. Mengolah singkong dan pisang tadi menjadi keripik dengan satu varian rasa. Rasa original, bermodalkan rasa yang ada dari garam saja. Tak ada rasa lain. Karena saya tahu pasti sudah banyak yang memakai berbagai jenis rasa,” tambah Siti sembari memperlihatkan keripik olahannya yang siap dijual.



Kripik singkong yang siap digoreng hasil olahan Siti (salah satu anggota kelompok usaha perempuan) di SP3 (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maliku)

Setiap olahan yang telah menjadi keripik dijual dengan harga 1.000 rupiah. Jika dijual lebih dari itu, tidak ada yang akan membeli. Penentuan harga itu sudah berdasarkan kalkulasinya. Sebab jika satu tandan pisang dijual 10.000 rupiah, ia bisa menghasilkan 60 sak plastik keripik siap jual. Maka dengan harga 1.000 rupiah saja, ia bisa mendapatkan untung lebih.

Dengan cara sederhana itu, bisa menunjukkan pengolahan hasil kebun yang awalnya sia-sia ini, sedikitnya telah memperlihatkan dukungan Siti Khalimah kepada suaminya dalam mengelola hasil perkebunan. Apalagi kebutuhan ekonomi setiap harinya selalu meningkat, dan Siti harus membantu roda perekonomian keluarga agar berjalan dengan lancar.

“Kalau untuk membantu ekonomi cukuplah buat jajan anak di sekolah juga. Jadi hasil kebun tak sia-sia seperti dulu lagi.”

### *Pabrik Tahu*

Dusun SP3 memiliki pabrik tahu. Ukurannya cukup sederhana, hanya sekira 4X8 meter. Namun sudah dua tahun lamanya pabrik tak beroperasi. Bunaeri, salah seorang warga, tergerak hatinya untuk menjalankan kembali pabrik tahu itu. Keinginannya disambut oleh Marsudi Lestantun, sebuah kelompok masyarakat, tempat di mana Bunaeri menjadi anggota di dalamnya.

“Warga di sini selalu kesusahan membeli ikan. Itu berarti kebutuhan protein mereka juga tidak akan terpenuhi. Saya berinisiatif menjalankan pabrik tahu yang sudah lama tidak digunakan demi kebutuhan protein warga SP3,” ujarnya.

Inisiatif Bunaeri itu ditanggapi positif oleh Kepala UPT (Unit Pelaksana Teknis), dan langsung memberikan mandat untuk menjalankan pabrik tersebut dengan membuat Kelompok Usaha Bersama (KUB) yang diberi nama KUB “Barokah”. Marsudi Lestantun ikut membantu KUB Barokah. Ketuanya adalah Bunaeri sendiri, dibantu 12 orang anggota lain, untuk menjalankan kerja-kerja bersama di pabrik tahu.

Bunaeri tak pernah memikirkan imbalan atau penghargaan apapun dalam kegiatannya membuat tahu, yang ia pikirkan hanyalah ketersediaan protein pengganti ikan untuk warga.

Selain itu, rencana lain sudah menunggu. Jika olahan tahu yang ia kerjakan bersama KUB dibantu oleh kelompok Marsudi Lestantun sudah mendapatkan hasil, keuntungan tersebut digunakan untuk pengembangan lain. Misalnya, hasil dari penjualan tahu dialokasikan untuk membeli ternak. Ternak nantinya dipelihara oleh anggota kelompok Marsudi Lestantun, serta diharapkan dapat dirasakan manfaatnya secara bersama-sama.

\*\*\*

Yang unik, pembuatan tahu dilakukan Bunaeri di malam hari, saat sebagian besar warga sedang terlelap oleh mimpi. Seperti malam itu, ia berangkat dari rumah ke pabrik pada pukul 01.00 Wita dini hari, dengan bermodalkan senter kecil yang terikat di kepalanya.

Listrik dalam pabrik bersumber dari PLTS (Pembangkit Listrik Tenaga Surya). Namun karena ada sedikit persoalan, listrik tidak menyala. Praktis Bunaeri membuat tahu sambil menahan dinginnya malam yang masuk dari sela-sela dinding pabrik, dengan lampu kecil sebagai penerang di atas kepalanya.

“Seiring pabrik tahu mulai dijalankan, beberapa hambatan mulai bermunculan. Terlebih lagi, masalah yang datang dari sumber kebutuhan listrik yang dipakai di pabrik pembuatan tahu,” katanya sambil mengaduk-ngaduk kedelai yang sudah terendam. “Pasokan listrik PLTS ke pabrik tahu KUB Barokah di permasalahan oleh warga dusun. Ada kesalahpahaman. Meski demikian, pabrik tahu harus tetap jalan,” ucap Bunaeri.

Untuk alasan itulah kenapa pekerjaan membuat tahu tak lagi dikerjakan di siang hari. Meski tubuhnya sering jadi sasaran gigitan nyamuk, ditemani suara jangkrik, dan dinginnya

malam, namun pabrik tahu terus jalan, demi pemenuhan pangan warga Dusun SP3.

“Saya kerja di malam hari dalam gelap sebagai bentuk protes kepada beberapa orang yang meremehkan pabrik tahu,” ujarnya.

Waktu menunjukkan pukul 03.00 dini hari. Semilir angin mulai menyerang Bunaeri. Namun ia terus berjibaku mengolah tahu hingga pagi menunggu. Tahu yang telah selesai dikerjakan dari pabrik KUB Barokah ini, akan dijual kepada warga Dusun SP3 serta ke pasar kampung.

Bunaeri menjualnya dengan harga yang sangat terjangkau. Setiap potongan dijual seharga 500 rupiah hingga 1.000 rupiah. Sementara setiap cetakan tahu bisa menghasilkan 30-45 potong tahu segar.

Tahu buatan Bunaeri selalu laris dan sangat diminati. Cita rasanya sangat khas. Baginya, ini bukan kali pertama membuat tahu. Sebab di kampung halamannya di Temanggung, Jawa Tengah, Bunaeri memiliki pengalaman sebagai pembuat tahu. Untuk masalah limbah tahu, ia sudah siap akan berakhir seperti apa.

“Ampas tahu akan dibuat tempe gembos dan air sisanya akan diberikan ke ternak peliharaan. Jadi masalah limbah itu sudah kami pikirkan sejak awal, seperti tujuan dari berdirinya kelompok Marsudi Lestantun, yaitu: maju bersama, jatuh juga harus sama-sama,” katanya sambil tersenyum. \*\*\*



Aktivitas Banaeri di pabrik tahu yang dikelola bersama kelompok Marsudi Lestantun di SP3 (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maluku)

## **Bab 8**

### **Memecahkan Polemik di Lahan Transmigrasi**

**D**alsono begitu semangat melangkahkan kaki melewati setiap lahan miring dengan medan yang begitu sulit. Lelaki 54 tahun itu hanya bermodalkan sebilah parang dan bekal air minum. Ia terus berjalan menuju Lahan Usaha (LU1) yang diberikan pemerintah kepadanya.

Meski konturnya miring, ia antusias menggarap kebunnya. Kondisi seperti ini sangat jamak terlihat di Dusun SP3. Apalagi wilayah mereka sangat berdekatan dengan Suaka Margasatwa Nantu-Bolijohuto, yang hanya dibatasi oleh sungai.

Hanya membutuhkan waktu 20 menit saja untuk tiba di kebun milik Dalsono. Berbagai jenis tanaman mulai tampak, seperti cabai rawit, bawang, dan jagung hibrida. Tak ada tanaman tahunan. Yang ada hanya pohon dan lahan yang telah di terasering. Namun setahun terakhir Dalsono telah mengurangi pemakaian jagung hibrida. Ia lebih memilih menanam jenis jagung lokal saja.

“Menanam jagung lokal lebih menyehatkan dibandingkan jagung hibrida pada umumnya,” ungkap Dalsono.

Setiap hari Dalsono menghabiskan waktunya di kebun. Namun sejak ada program royongan yang dibuat kelompok Marsudi Lestantun, Dalsono tak terlihat di kebunnya. Royongan yang berarti gotong royong, dijadwalkan setiap hari Kamis dan Minggu. Sebagai anggota, Dalsono wajib

hadir menggarap lahan secara bersama-sama dengan anggota kelompok Marsudi Lestantun lainnya. Mereka bergiliran membantu menggarap kebun setiap anggota kelompok.

“Lahan saya sudah dapat jadwal royongan minggu kemarin. Jadi giliran yang lain lagi untuk minggu ini,” ujar Dalsono.

Menurutnya, royongan atau menggarap lahan secara bersama-sama telah mereka lakukan sejak mendapatkan lahan usaha dari pemerintah. Inisiatif mengerjakan lahan bersama-sama itu untuk mempermudah satu dan yang lainnya.



Kegiatan royongan yang dilakukan secara bergilir setiap minggu di kelompok Marsudi Lestantun, SP3 Desa Saritani (Foto oleh: Perkumpulan JAPESDA Gorontalo/ Moh. Noer Fadli Maluku)

Hari itu, di akhir Desember 2019, Dalsono mengambil pekerjaan tambahan membersihkan lahan usaha milik warga lainnya. Rute yang dilalui pun tak ada bedanya: menanjak dan tak ada pepohonan penyangga yang bisa digunakan sebagai tempat berteduh ketika lelah. Tapi bagi Dalsono itu sudah menjadi santapannya sehari-hari setiap kali menuju kebunnya.

Apalagi sebelum mengikuti program transmigrasi Dalsono bekerja serabutan. Lambatnya perputaran ekonomi di Dusun SP3 mengharuskan warga dusun seperti Dalsono untuk mencari tambahan lain selain dari hasil pertanian yang ditanam di kebun mereka.

“Hidup di sini kalau bergantung pada hasil kebun sendiri susah rasanya. Makanya saya memilih mengambil pekerjaan sampingan seperti sekarang ini; membersihkan lahan usaha warga,” ucap Dalsono sambil memotong beberapa kayu yang menghambat perjalanan.

\*\*\*

Ketika mentari tepat berada di atas kepala, sesegara mungkin parang yang ia pakai bekerja dihentikan. Ia lalu menuju tempat paling teduh, mengambil bekalnya tadi; sebotol air minum, dan kemudian meminumnya. Saat sedang beristirahat itu, Dalsono menceritakan keluh kesahnya selama tinggal di Dusun SP3 Pabuto.

Tahun 2012, program transmigrasi dicanangkan di dusun SP3, desa Saritani, kecamatan Wonosari, kabupaten Boalemo. Jauh sebelumnya, Dalsono sudah mendaftarkan diri dan tinggal menunggu panggilan untuk ditempatkan pada lokasi pemukiman nanti. Setelah mengetahui lokasi penempatannya di Gorontalo, Dalsono sangat senang. Karena daerah itu sebelumnya pernah ia kunjungi sewaktu bekerja serabutan.

Hal lain yang membuat ia senang karena mendengar bahwa mereka akan memperoleh lahan usaha seluas dua hektar beserta jatah hidup seperti beras, minyak goreng, gula, kopi, kecap, ikan garam, dan kebutuhan dapur lainnya. Namun, setelah tahun 2017 menetap sebagai warga dusun SP3 Pabuto, Dalsono mulai merasakan bahwa pembagian jatah

hidup seperti sembako dan kebutuhan dapur tidak sesuai dari apa yang seharusnya diterima.

"Saya sudah tinggal di sini dari tahun 2017. Tapi sampai dengan saat ini, kepemilikan LU2 (Lahan Usaha 2) belum menemui titik yang terang, dan sering juga jatah hidup yang diberikan selalu tidak sesuai," kata Dalsono.

Penetapan dan pembagian LU2 selalu menjadi permasalahan yang belum juga mendapatkan titik terang. Karena pada saat dinas terkait menempatkan lokasi LU2, sering kali mendapat hambatan dari warga lokal yang mengklaim bahwa lahan tersebut milik mereka bukan milik pemerintah.

"Persoalan lahan ini sudah kami diskusikan dengan KUPT (Kepala Unit Pelaksana Tekhnis), karena ada ancaman. Kami ingin hidup damai, tidak mau berkonflik dengan siapapun."

Vial Grufi Bulyanto (30 tahun), Ketua Kelompok Marsudi Lestantun, mengatakan hal yang sama. Menurutnya kegelisahan warga di dusun SP3 bukan hanya persoalan lahan saja, tapi persoalan jatah hidup sisa yang tak kunjung diberikan kepada 22 warga di Dusun SP3.

Bahkan sebagian warga melapor sampai ke DPRD untuk mendapatkan titik temu serta jawaban yang pasti. Sesuai surat yang mereka layangkan kepada pemerintah untuk menjawab permasalahan, seharusnya sudah selesai. Tapi sampai dengan saat ini permasalahan itu belum juga terselesaikan.

"Jatah hidup sisa yang belum diberikan itu kalau dinominalkan sebesar 24 juta rupiah dan akan dibagikan dua tahap pada tahun 2018 lalu. Tapi semua itu, sampai dengan

saat ini belum kami terima,” ungkap Vial dengan raut wajah yang sedih.

Ada sebagian kekhawatiran yang muncul, jika tugas KUPT selesai di dusun SP3 Pabuto, maka urusan permasalahan mengenai jatah hidup dan pembagian LU2 yang bermasalah itu, tak akan segera tertangani.

Sementara itu, David Radjak, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) menjelaskan, bahwa daerah SP3 yang merupakan usulan program transmigrasi yang berada di wilayah administrasi desa Saritani, berbatasan langsung dengan kawasan Suaka Margastawa (SM) Nantu. Hanya berjarak beberapa meter saja dengan batas alam berupa sungai, yang merupakan hulu dari Daerah Aliran Sungai (DAS) Paguyaman.

Dusun SP3 sendiri, meski telah disetujui oleh pemerintah, namun secara administrasi masih menjadi daerah binaan dari Dinas Transmigrasi Provinsi Gorontalo. Hanya saja catatan kependudukan mereka sudah masuk dalam pendataan pemerintahan desa Saritani, dengan usulan lahan seluas 673 hektar serta rencana penempatan sebanyak 200 Kepala Keluarga (KK) yang bakal tinggal di daerah usulan tersebut.

Usulan awal luasan ini sudah termasuk rumah, pekarangan, dan lahan usaha garapan seluas 2 hektare setiap KK. Namun, usulan program transmigrasi yang ditujukan kepada Balai Pemantapan Kawasan Hutan (BPKH) Provinsi Gorontalo itu, baru terealisasi pada tahun 2015.

Hasilnya, usulan luasan yang awalnya 673 hektar, menjadi 408 hektar sesuai putusan dan persetujuan BPKH Provinsi Gorontalo.

Setelah mendapatkan persetujuan dari BPKH pada akhir tahun 2015, wilayah SP3 mulai didatangkan penghuni sebanyak 50 KK dari Transmigrasi Penduduk Setempat (TPS). Tahun 2016 sebanyak 46 KK yang didatangkan dari Transmigrasi Penduduk Asal (TPA); 4 KK lainnya batal karena kesalahan administrasi dan sakit diganti dengan 4 KK dari TPS. Kedatangan pertama kali warga di dusun SP3 Pabuto, adalah awal dari pembukaan lahan yang diperuntukkan untuk warga transmigran.

“Dengan pengurangan kawasan pada usulan awal, kemungkinan juga berdampak pada penetapan lokasi lahan usaha garapan nanti,” kata David. Menurutnya jika sejak awal usulan itu diterima secara keseluruhan, maka tidak sulit lagi untuk memilih atau menetapkan lokasi lahan usaha dua hektar bagi warga di dusun SP3 ini. Sebab penentuan lokasi tersebut juga terkait dengan dinas terkait lainnya yang memiliki kewenangan.

“Permasalahan lahan ini sementara ditangani dan akan direspon oleh pemerintah atau dinas terkait, termasuk juga mengenai penyerobotan lahan yang dilakukan oleh warga lokal,” ujar David.

### *Pembukaan Lahan Tidak Efektif*

Lahan yang ada di dusun SP3 Pabuto berada pada posisi yang miring. Bahkan semua pembukaan lahan dikerjakan dengan cara yang tidak ramah lingkungan. Lahan pertanian warga dibuka dengan cara ditebang dan kemudian dibakar. Bagi warga setempat, itu merupakan cara efektif. Meski mereka tahu ada larangan untuk tidak membakar lahan.

Ismail, staf lapangan dari Jaring Advokasi Pengelolaan Sumberdaya Alam (Japesda) yang melaksanakan pendampingan di dusun SP3 Pabuto, mengatakan bahwa pemandangan seperti itu lazim dilihat, meskipun ada

peringatan bahkan teguran yang diberikan secara lisan, tetapi warga tetap membakar sisa-sisa pohon dan rumput.

“Pembukaan lahan seperti ini selain tidak ramah lingkungan, juga akan berdampak buruk pada keberadaan Daerah Aliran Sungai (DAS) Paguyaman saat musim penghujan tiba,” ujar Ismail.

Mengingat posisi lahan garapan di dusun SP3 Pabuto berada pada kemiringan, maka dikhawatirkan bisa menyebabkan erosi, dan bisa mengancam tanaman pertanian karena kurangnya pohon penyangga di setiap lahan. Pembakaran lahan tidak hanya dilakukan oleh warga dusun SP3, tapi juga warga lokal yang mengklaim mempunyai tanah di sekitar area tersebut.

“Kalau melihat kondisi di sini, rata-rata setiap pembukaan lahan setelah ditebang pohonnya, pasti dibakar. Apalagi saat kemarau, dan setiap kali terjadi pembakaran lahan seperti itu, pelaku sangat jarang kita temui di lapangan,” tambah David Radjak, KUPT dusun SP3 Pabuto.

Pemerintah pun seringkali menggunakan pihak ketiga untuk melaksanakan pembukaan lahan bagi lahan usaha yang ditujukan untuk warga transmigrasi. Pihak ketiga ini merupakan warga sekitar atau warga lokal, yang diupah sesuai pekerjaannya oleh pemenang tender atas pembukaan lahan tersebut.

“Kami mau selidiki tapi tidak tahu siapa yang membakar,” kata David.

David menuturkan, setiap warga transmigrasi yang berada di dusun SP3 Pabuto mendapatkan lahan usaha seluas 2 hektar. Namun, yang diserahkan oleh Dinas Transmigrasi baru lahan seluas 1 hektar, sedangkan lahan 1 hektar

laginya akan dibuka sendiri oleh warga transmigrasi, yang sudah ditentukan batas-batasnya dari pihak pemerintah.

"Pada pembukaan sendiri ini terkadang warga juga melakukan pembakaran," ungkap David.

Selain Dalsono, salah salah seorang warga yang sering menjumpai masalah serupa adalah Irmanto (38). Lahan usaha kedua yang ia terima dan mulai dikerjakan selama berbulan-bulan menemui hambatan, berupa pengakuan secara sepihak oleh warga lokal atas kepemilikan LU2 miliknya.

"Saat lahan tersebut sudah bersih dan siap diolah, tiba-tiba ada warga lokal yang mengakui tanah itu miliknya. Masalah itu sudah saya adukan ke pihak UPT dan masih sementara dalam proses penyelesaian," keluh Irmanto.

### *Mengusulkan HKM sebagai Solusi*

Selain kepemilikan lahan usaha yang belum jelas, saat ini warga di dusun SP3 sedang harap cemas. Pasalnya mereka sedang dalam proses pengusulan izin pengelolaan Kawasan hutan melalui Perhutanan Sosial (PS) dengan skema Hutan Kemasyarakatan (HKM) pada Hutan Produksi Terbatas (HPT) yang dekat dengan kawasan dusun SP3. Namun sampai dengan saat ini belum ada kejelasan. Sekira enam bulan lamanya proposal pengajuan HPT menjadi HKM oleh warga SP3 belum mendapatkan respon dari pemerintah.

Pengelolaan Hutan Kemasyarakatan yang diajukan oleh masyarakat merujuk pada Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia No.P-88/ Menhut-II/2014, dimana hutan negara pemanfaatannya ditunjukkan untuk pemberdayaan kesejahteraan masyarakat yang tinggal di dalam maupun di luar kawasan hutan.

Atas dasar peraturan menteri tersebut, warga dusun SP3 mengajukan HPT ke HKM. Dengan tujuan ingin mengurangi dan mengantisipasi sering terjadinya polemik, seperti penyerobotan lahan, pembukaan lahan secara ilegal, pembakaran lahan secara sembarangan; serta keinginan warga SP3 untuk tetap menjaga keberadaan cakupan tangkapan air yang melimpah, yang dapat mereka jadikan sebagai sumber utama air bersih bagi masyarakat. Selain itu, lebih pada melindungi DAS Paguyaman.

Menurut David Radjak, usulan warga SP3 mengenai HPT ke HKM sudah diajukan di tahun 2019 dan sekarang masih dalam tahap proses pemeriksaan. Apalagi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sudah melakukan survei, serta sudah menyatakan bahwa lokasi usulan tersebut sangat layak.

“Tujuan pengusulan itu semata-mata hanya ingin menjaga cakupan dan tangkapan air yang berada di bagian Selatan. Itu juga salah satu usulan kami, dan pemerintah juga setuju, proses terakhir diverifikasi teknis, dan tinggal menunggu Surat Keputusan (SK) perijinannya dari KLHK,” ujar David.

Ketua Kelompok Marsudi Lestantun, Vial Grufi Bulyanto, mengatakan hal yang sama, bahwa mereka ingin mengamankan lahan di sekitar air tersebut agar tak digunakan secara ilegal. HKM yang diusulkan juga berfungsi untuk menjaga hutan dari pembukaan lahan secara liar oleh warga.

“Salah satunya untuk menjaga area tangkapan air juga yang ada di SP3 Pabuto ini.”

\*\*\*